

**ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS
TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
WILAYAH
(Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

PRABOWO SISWANTO

NIM. C2B607045

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Prabowo Siswanto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B607045

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN
BEBAS TERHADAP KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (STUDI
KASUS: PROVINSI JAWA TENGAH)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H Miyasto, SU

Semarang, 4 April 2011

Dosen Pembimbing,



(Prof. Dr. H Miyasto, SU)

NIP. 195012251975011001


PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Prabowo Siswanto
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607045
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN
BEBAS TERHADAP KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (STUDI
KASUS: PROVINSI JAWA TENGAH)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 April 2011

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H Miyasto, SU

(..........)

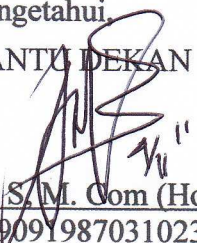
2. Prof. Drs. Waridin MS. Ph.D

(..........)

3. Drs. Y. Bagio Mudakir, MT

(..........)

Mengetahui,
PEMBANTU DEKAN I


Prof. Dr. H. Arifin S. M. Com (Hons.) Akt
NIP 196009091987031023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Prabowo Siswanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 April 2011

Yang membuat pernyataan,

(Prabowo Siswanto)
NIM: C2B607045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan apabila telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (SR. Alam Nasyrah, 6-7)

“Jangan pernah mengambil langkah mundur walaupun untuk mengambil kesempatan karena hanya orang yang berani gagal yang bisa meraih sukses besar.”

**Kupersembahkan karya kecilku ini
untuk keluarga dan orang-orang terdekatku
yang selalu memberikan semangat**

ABSTRACT

Economic development is the main instrument for achieving national goals. There are many efforts towards the success of development, including trade liberalization and fiscal decentralization. Liberalization of trade (8 October 2003, AFTA). Fiscal Decentralization (1 January 2001), as the demands of change centralization under the Law. 32/2004 on Regional Governance and Law. 33/2004 on Financial Balance and Regional Center (revision of Law No. 22/1999 and Law No. 25/1999). Economic growth of Central Java province from years has increased. However, uneven economic growth between the County/ City.

This study aims to analyze impact of free trade, foreign direct investment, economic growth, fiscal decentralization, tax region, the economic crisis on inequality of development. The analytical tool used is the Engle-Granger's Error Correction Models (EG-ECM).

Econometric analysis shows free trade, economic growth, fiscal decentralization has positive influence on the development gap in the short and long term. Meanwhile, local taxes have a negative effect on inequality of development in the short and long term. Then, there are differences in inequality of development before and after the 1997 economic crisis in Indonesia. As a follow up to solve the problem of inequality of development, the provincial government needs to determine the appropriate strategy and policy.

Keywords :*Inquality of Regional Development, Free Trade, Foreign Direct Investment, Economic Growth, Fiscal Decentralization, Local Taxes, Economic Crisis, Engle-Granger's Error Correction Models (EG-ECM)*

ABSTRAKSI

Pembangunan ekonomi merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan nasional. Ada berbagai upaya untuk menuju keberhasilan pembangunan, antara lain liberalisasi perdagangan dan desentralisasi fiskal. Liberalisasi perdagangan (8 oktober 2003, AFTA). Desentralisasi fiskal (1 januari 2001), sebagai tuntutan perubahan sentralisasi berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (revisi dari UU no 22/1999 dan UU no 25/1999). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak merata antara Kabupaten/Kota.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perdagangan bebas, investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak daerah, krisis ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan. Alat analisis yang digunakan adalah *Engle-Granger Error Correction Model* (EG-ECM).

Analisis ekonometri menunjukkan perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan, pajak daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, terdapat perbedaan ketimpangan pembangunan sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997 di Indonesia. Sebagai tindak lanjut untuk memecahkan masalah ketimpangan pembangunan, maka pemerintah provinsi perlu menentukan strategi dan kebijakan yang sesuai.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Perdagangan Bebas, Investasi Asing Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah, Krisis Ekonomi, *Engle-Granger Error Correction Model* (EG-ECM).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi Kasus: di Provinsi Jawa Tengah)*”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perdagangan bebas terhadap Pembangunan Wilayah di Jawa Tengah pada tahun 1996-2008 karena untuk membandingkan kondisi Pembangunan Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. H Miyasto, SU selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, nasehat dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Drs. Waridin MS. Ph.D selaku dosen wali yang telah memberikan petunjuk dan dorongan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di jurusan IESP Fakultas Ekonomi UNDIP.
5. Evi Yulia Purwanti, SE., MSi selaku koordinator jurusan IESP yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi UNDIP.

6. Firmansyah, SE., MSi, Drs Nugroho SBM, MSP yang mengajari ekonometrika.
7. Banatul Hayati, S.E., M.Si., Arif Pujiyono, S.E., M.Si. dan Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si. yang mengajari makroekonomi dan metode penelitian.
8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Ayahanda tercinta Eko Siswanto dan Ibunda tersayang Suprpti Budiharti , atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT akan membalasnya.
10. Teman-teman IESP Reguler 2 angkatan 2006 dan 2007: Azi (06), Fajar (06), Riza (06), Arcibald (07), Arjanggi (07) dan seluruh teman-teman IESP Reguler 2 angkatan 2006 dan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala bantuan, kerjasama, dan kenangan yang telah kalian berikan.
11. Teman-teman IESP Reguler 2 angkatan 2006, Primasari dan Ganis yang telah memotivasi dan memberikan gambaran tentang skripsi. Teman-teman EGA, Tomy, Wuni, dan Nurul yang telah menuntun belajar bahasa inggris.
12. Teman-teman KKN Kecamatan Tembalang kelurahan Bulusan. Kenangan manis bersama kalian tidak terlupakan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 4 April 2011

Penulis

Prabowo Siswanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Motto dan Persembahan	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan penelitian.....	15
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi	17
2.1.2 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.3 Konsep Ketimpangan.....	25
2.1.3.1 Trickling Down Effect dan Polarization Effect.....	30
2.1.3.2 Pengukuran Ketidakmerataan Regional.....	32
2.1.3.3 Konsep PDRB Perkapita Relatif.....	33
2.1.4 Teori Perdagangan Internasional	33
2.1.4.1 Teori Keunggulan Absolut	34
2.1.4.2 Teori Keunggulan Komparatif	36
2.1.4.3 Teori Heckscher-Ohlin (H-O).....	37
2.1.5 Hubungan Perdagangan Bebas dengan Ketimpangan Regional.....	38
2.1.6 Hubungan Investasi Asing dengan Ketimpangan Regional	44
2.1.7 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Regional	50
2.1.8 Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Regional	56
2.1.8.1 Pengukuran Desentralisasi Fiskal.....	63

2.1.9	Hubungan Pajak Daerah dengan Ketimpangan Regional	68
2.1.10	Hubungan Krisis Ekonomi dengan Ketimpangan Pembangunan.....	74
2.2	Penelitian Terdahulu	77
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	85
2.4	Hipotesis	87
BAB III	Metode Penelitian	
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	88
3.1.1	Variabel Penelitian	88
3.1.2	Definisi Operasional	88
3.2	Populasi	91
3.3	Jenis dan Sumber Data	91
3.4	Metode Pengumpulan Data	93
3.5	Metode Analisis	94
3.5.1.	Stasioneritas Data	98
3.5.2.	Uji Akar-Akar Unit	99
3.5.3.	Uji Derajat Integrasi	101
3.5.4.	Uji Kointegrasi.....	101
3.5.5.	Penentuan Panjang Lag	104
3.5.6.	Model Koreksi Kesalahan Engle-Granger.....	105
3.5.7.	Pengujian Asumsi Klasik.....	113
3.5.7.1.	Uji Heterokedastisitas	113
3.5.7.2.	Uji Autokorelasi	113
3.5.7.3.	Uji Multikolineritas.....	115
3.5.7.4.	Uji Normalitas	116
3.5.8.	Pengujian Kriteria Statistik Analisis Regresi.....	117
3.5.6.1	Pengujian Koefisien Determinasi	118
3.5.6.2	Uji Signifikansi Simultan.....	119
3.5.6.3	Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual	119
BAB IV	Pembahasan	
4.1	Diskripsi Objek Penelitian	122
4.1.1	Keadaan Geografis	122
4.1.2	Ketimpangan Pembangunan Wilayah	123
4.1.3	Perdagangan Bebas	125
4.1.4	Investasi Asing Langsung.....	127
4.1.5	Pertumbuhan Ekonomi	129
4.1.6	Desentralisasi Fiskal.....	130
4.1.7	Pajak Daerah	132
4.2	Analisis Data	133
4.2.1	Uji Stasioneritas	134
4.2.1.1	Uji Akar-Akar Unit	134
4.2.1.2	Uji Derajat Integrasi	135

4.2.2	Uji Kointegrasi.....	136
4.2.3	Hasil Estimasi Model Jangka Panjang dan Model Jangka Pendek.....	137
	A. Estimasi Model ECM E-G Jangka Panjang	137
4.2.3.1	Pengujian Kriteria Statistik Analisis Regresi ...	137
	A.1 Koefisien Determinasi	137
	A.2 Pengujian Secara Bersama-sama.....	138
	A.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual.....	138
	A.4 Asumsi Klasik	139
	a. Uji Autokorelasi	140
	b. Uji Heteroskedastisitas	141
	c. Uji Normalitas	142
	d. Uji Multikolinearitas	143
	A.5 Krisis Ekonomi.....	143
	A.6 Standardized Coefficients Jangka Panjang	144
	B. Estimasi Model ECM E-G Jangka Pendek	145
4.2.3.2	Pengujian Kriteria Statistik Analisis Regresi ...	146
	B.1 Koefisien Determinasi.....	146
	B.2 Pengujian Secara Bersama-Sama	146
	B.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual	147
	B.4 Asumsi Klasik.....	148
	A. Uji Autokorelasi	148
	B. Uji Heteroskedastisitas	149
	C. Uji Normalitas	149
	D. Uji Multikolinearitas	150
	B.5 Error Correction Term	150
	B.5 Krisis Ekonomi	151
	B.5 Standardized Coefficients Jangka Pendek.....	152
4.3	Intepretasi Hasil dan Pembahasan	153
4.3.1	Analisis Pengaruh Perdagangan Bebas Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah	154
4.3.2	Analisis Pengaruh Investasi Asing Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah	154
4.3.3	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah	156
4.3.4	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah	157
4.3.5	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah	158
4.3.6	Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Jawa	

Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 159

BAB V	Penutup	
	5.1	Kesimpulan 161
	5.2	Saran 162

Daftar Pustaka
Lampiran – lampiran

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Kab./Kota Di Provinsi Jawa Tengah	4
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu	81
Tabel 1.3	<i>Unit Root Test</i> (Uji Akr Unit)	134
Tabel 1.4	Uji Derajat Integrasi	135
Tabel 1.5	Uji Kointegrasi	136
Tabel 1.6	Hasil Estimasi Jangka Panjang.....	137
Tabel 1.7	Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test Jangka Panjang.....	140
Tabel 1.8	Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test Jangka Panjang.....	141
Tabel 1.9	Uji Normalitas <i>Jarque-Bera</i>	142
Tabel 1.10	Uji multikolinearitas metode <i>auxiliary regression</i>	143
Tabel 1.11	Hasil Estimasi Jangka Pendek	145
Tabel 1.12	Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test Jangka Pendek.....	147
Tabel 1.13	Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test Jangka Pendek	148
Tabel 1.14	Uji Normalitas <i>Jarque-Bera</i>	149
Tabel 1.15	Uji Multikolinearitas Jangka Pendek.....	150
Tabel 1.16	Perbandingan Antara Hipotesis dan Temuan Empirik.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2008 (dalam juta rupiah).....	6
Gambar 1.2	Kurva Kuznet	55
Gambar 1.3	Kerangka Pemikiran Penelitian	85
Gambar 1.4	Indeks Ketimpangan Wilayah Ekonomi Tahun 1996-2008.....	124
Gambar 1.5	Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2008.....	125
Gambar 1.6	Kurva Hubungan Antara Indeks Ketimpangan Wilayah Dengan Perdagangan Bebas Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2008.....	126
Gambar 1.7	Investasi Asing Langsung Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2008.....	128
Gambar 1.8	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2008	130
Gambar 1.9	Indikator Desentralisasi Fiskal Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2008	131
Gambar 2.0	Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-2008	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pembangunan antarwilayah (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut (Arsyad, 1997). Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara maju/kaya maupun negara terbelakang/miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui bahwa suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering

dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional.

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Akan tetapi untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dan hambatan tersebut semakin dirasa setelah berlakunya liberalisasi perdagangan di Indonesia. Liberalisasi perdagangan ini berawal dari kesepakatan tanggal 8 oktober 2003 dimana Indonesia, Brunei Darusalam, Malaysia, Philipina Singapura dan Thailand sepakat mencapai target bea masuk dengan tariff 0% minimal 60%.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 telah membuka kesadaran akan pentingnya makna ketergantungan antara suatu Negara terhadap Negara lain yang membentuk suatu liberalisasi perdagangan (Mardiasmo, 2000). Hal ini, liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Liberalisasi perdagangan bertujuan meningkatkan perdagangan antar Negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN trade*), dan menarik lebih banyak penanaman modal asing (PMA).

Perhitungan ketimpangan antar wilayah di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan penelitian Tantia Hastarini dengan menggunakan data *time series* dari tahun 1981 hingga tahun 2000 menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini juga ditunjukkan

oleh perhitungan ketimpangan ekonomi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah yakni tahun 1999 mencapai 0,75; tahun 2000 mencapai 0,78; tahun 2001 sebesar 0,76; tahun 2002 sebesar 0,77; tahun 2003 sebesar 0,80 ; tahun 2004 sebesar 0,76; dan tahun 2005 sebesar 0,76 (Bappeda, Perda No. 11, 2003).

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota, mempunyai latar belakang (karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam) berbeda-beda antar wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

Tabel 1.1
Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Kab./Kota Jawa Tengah
Tahun 2006 – 2008

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2006	2007	2008
Kab. Cilacap	12.18	12.13	12.11
Kab. Banyumas	4.19	4.14	3.90
Kab. Purbalingga	3.87	3.91	3.90
Kab. Banjarnegara	4.63	4.60	4.57
Kab. Kebumen	3.30	3.26	3.27
Kab. Purworejo	6.26	6.33	6.36
Kab. Wonosobo	3.47	3.40	3.33
Kab. Magelang	5.15	5.14	5.11
Kab. Boyolali	7.14	7.06	6.99
Kab. Klaten	6.01	5.90	5.83
Kab. Sukoharjo	9.66	9.62	9.57
Kab. Wonogiri	3.79	3.69	3.49
Kab. Karanganyar	10.15	10.57	10.52
Kab. Sragen	5.04	5.07	5.10
Kab. Grobogan	3.16	3.12	3.12
Kab. Blora	3.40	3.36	3.38
Kab. Rembang	5.90	5.81	5.72
Kab. Pati	5.49	5.47	5.46
Kab. Kudus	30.48	29.72	29.28
Kab. Jepara	6.16	6.05	5.93
Kab. Demak	4.25	4.21	4.05
Kab. Semarang	10.05	10.01	9.83
Kab. Temanggung	5.28	5.16	5.05
Kab. Kendal	9.41	9.32	8.93
Kab. Batang	5.22	5.10	5.01
Kab. Pekalongan	5.49	5.41	4.98
Kab. Pemasaran	3.62	3.45	3.42
Kab. Tegal	3.26	3.26	3.27
Kab. Brebes	4.60	4.58	4.56
Kota Magelang	15.23	14.93	14.55
Kota Surakarta	15.90	15.99	15.91
Kota Salatiga	8.36	8.59	8.57
Kota Semarang	24.70	24.74	24.25
Kota Pekalongan	12.93	12.66	12.44
Kota Tegal	8.14	8.163	8.15

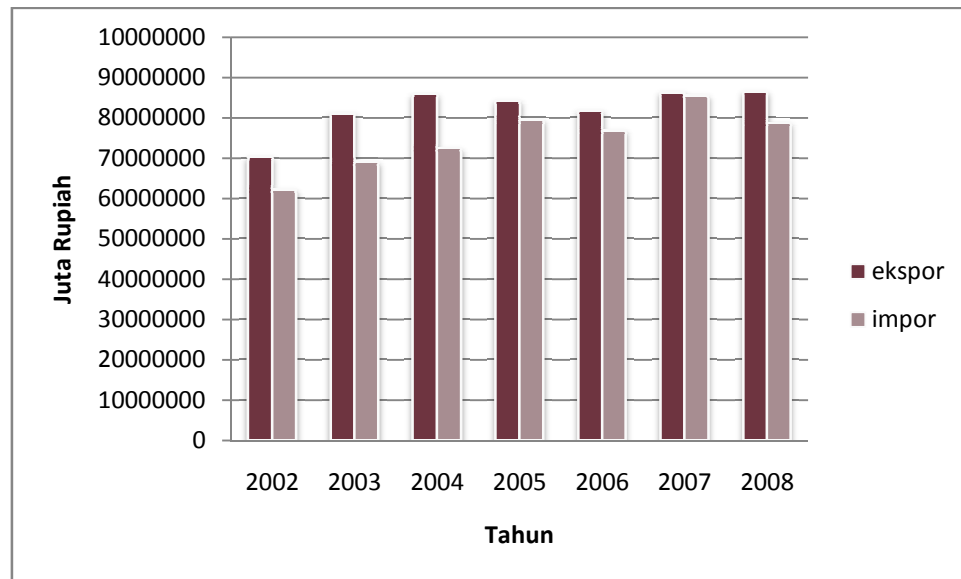
Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia, Berbagai Tahun Terbitan, diolah

Selama tahun 2006-2008 masih terjadi ketimpangan wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan pendekatan PDRB perkapita relatif. Apabila nilai PDRB perkapita relatif lebih dari 1 maka menunjukkan wilayah tersebut semakin timpang, sedangkan bila nilai PDRB per kapita relatif semakin mendekati 0 maka semakin merata (Jaime Bonet, 2006). Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tingkat ketimpangan tertinggi berada di kabupaten Banyumas sebesar 29.28, namun nilai tersebut menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Sedangkan, ketimpangan paling rendah berada di Kabupaten Kebumen sebesar 3.27 tahun 2008 menurun, dibandingkan tahun 2006.

Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (Muhammad, 1995).

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional global (GATT-WTO) maupun regional (AFTA, APEC dan CAFTA) bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama sektor usaha industri kecil dan menengah baik secara nasional maupun internasional yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional (Muhammad 1995). Sehingga, kebijaksanaan tersebut dapat terciptanya pertumbuhan yang tinggi disertai dengan pemerataan pendapatan di suatu Negara.

Gambar 1.1
Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 – 2008 (dalam juta rupiah)



Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia, Berbagai Tahun Terbitan, diolah

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan nilai ekspor dan impor Provinsi Jawa Tengah, tahun 2003 ekspor mencapai 81103062.96 (juta Rp) meningkat tahun 2004 meningkat menjadi 85812525.5 (juta Rp), sedangkan tahun 2003 impor mencapai 69023446.21 (juta Rp) meningkat tahun 2004 meningkat menjadi 72384935.64 (juta Rp). Hal ini, karena terjadi kesepakatan liberalisasi perdagangan tanggal 8 oktober 2003 di Indonesia dengan Brunei Darusalam, Malaysia, Philipina Singapura dan Thailand. Peningkatan ekspor dan impor ini terjadi sampai tahun 2008. Namun ketika tahun 2005 ekspor mencapai 84190191 (juta Rp) menurun tahun 2006 meningkat menjadi 81711105.48 (juta Rp), sedangkan impor

mencapai 79427557.66 (juta Rp) meningkat tahun 2005 menurun menjadi 76782213.17 (juta Rp) tahun 2006.

Jika dilihat dari Tabel 1.1 dan Gambar 1.1, menunjukkan bahwa selama tahun 2006-2008 terjadi peningkatan aktifitas ekspor dan impor dari dampak kebijakan liberalisasi perdagangan, yang bermaksud meningkatkan pertumbuhan suatu daerah untuk mencapai kemakmuran. Namun, disamping itu terjadi peningkatan ketimpangan wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan PDRB perkapita relatif.

Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah ini disebabkan oleh banyak faktor. Seperti pada teori Myrdal (dalam Jhingan, 1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini, disebabkan karena adanya dampak balik (*backwash effect*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya investasi.

Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang yang

lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 1990). Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang. Peningkatan nilai investasi swasta yang berarti peningkatan kegiatan penanaman modal akan mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun (Budiantoro, 2008).

Investasi swasta yang masuk baik dari asing maupun dalam negeri jumlahnya fluktuatif dan cenderung tinggi. Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Disisi lain seperti yang dikatakan oleh Myrdal dalam teorinya mengenai dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmarataan pembangunan.

Armida S. Alisjahbana (2005), mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antardaerah yang lebih lebar. Pada tingkat Provinsi, masih terjadi ketimpangan selama tahun 1990an sampai 2000.

Penetapan kebijakan desentralisasi fiskal dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal 1 Januari 2001, sebagai tuntutan perubahan sentralisasi (UU No.5 tahun 1974) berubah menjadi desentralisasi (UU No.22 tahun 1999), kemudian terjadi perubahan UU No.22 tahun 1999 menjadi UU No.32 tahun 2004, bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Mudrajad, 2004).

Desentralisasi fiskal dapat dicirikan, sebagai proses kenaikan menyeluruh kenaikan pada transfer dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan batasan otonomi daerah. Daerah otonom berhak memutuskan penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai yang tertera pada undang-undang desentralisasi.

Desentralisasi fiskal akan tidak akan berguna, jika tidak di ikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No.33 tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah, menurut Budiantoro (2008) bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan

pembangunan diperlukan sumber dana. Pencapaian keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 diamanatkan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan para pendiri Negara (*founding father*) telah menempatkan pajak dalam konstitusi Negara. Walaupun penarikan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat, namun pada akhirnya pajak digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sehingga disini peran pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi sangat penting (Miyasto, dkk, 1990) oleh karenanya diperlukan struktur pajak yang baik. Menurut Sjafrizal (2008), Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka setiap daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih berwenang untuk menggali potensi daerahnya akan meningkatkan pertumbuhan daerahnya dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Usaha pemerintah dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan terkendali yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah/wilayah yaitu antara lain dengan menerapkan sistem desentralisasi fiskal (2001) dan liberalisasi perdagangan ditandai dengan AFTA di Indonesia (2003). Karena pentingnya masalah ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi di era desentralisasi fiskal dan liberalisasi perdagangan, mengacu pada latar belakang

masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, sehingga nantinya akan dapat diketahui strategi pengurangan ketimpangan pembangunan ekonominya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka sangat menarik untuk menganalisis “Analisis Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)”. Sedangkan periode pengamatan pada penelitian adalah tahun 1996-2008.

1.2 Rumusan Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 telah membuka kesadaran pentingnya makna ketergantungan antara suatu negara terhadap negara lain yang membentuk suatu liberalisasi perdagangan (Mardiasmo, 2000). Liberalisasi perdagangan ini berawal dari kesepakatan tanggal 8 oktober 2003 pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun, dimana Indonesia, Brunei Darusalam, Malaysia, Philipina Singapura dan Thailand sepakat mencapai target bea masuk dengan tariff 0% minimal 60%.

Selama tahun 2006-2008 terjadi peningkatan aktivitas ekspor dan impor Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari dampak kebijakan liberalisasi perdagangan. Namun, terjadi pula peningkatan ketimpangan wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Barl dan Linn (1992), dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, menurut Hirschman (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa terjadi di seluruh wilayah pada saat bersamaan. Ketika pertumbuhan terjadi, kekuatan yang ada akan terkonsentrasi di sekitar pusat pertumbuhan.

Penelitian Jamie Bonet (2006), bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan wilayah dengan bukti pengalaman dari negara Kolombia,

membuktikan bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional.

Masalah ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1996 sampai tahun 2008 juga menunjukkan semakin melebar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya liberalisasi perdagangan dan desentralisasi fiskal, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian yakni :

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1996 – 2008?
2. Bagaimana pengaruh perdagangan bebas terhadap tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh investasi asing langsung terhadap tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah?
6. Bagaimana perbedaan tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah:

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1996 – 2008.
2. Menganalisis pengaruh perdagangan bebas terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Menganalisis pengaruh investasi asing langsung terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menganalisis perbedaan tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini.
2. Sebagai bahan kajian bagi penelitian lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peneliti sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek yang sesungguhnya

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang diberi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variable penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat mengenai keadaan obyek penelitian, kondisi tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekspor dan impor, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, pajak daerah dan dilanjutkan dengan analisis data.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Berbagai teori yang dikemukakan dibawah adalah merupakan dasar dalam perumusan hipotesis dan landasan dalam melakukan analisis penelitian ini. Dalam landasan ini akan dibahas mengenai ketimpangan pembangunan, hubungan antara ketimpangan pembangunan dengan perdagangan bebas, hubungan ketimpangan pembangunan dengan investasi asing, hubungan ketimpangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan ketimpangan pembangunan dengan desentralisasi fiskal, hubungan ketimpangan pembangunan dengan pajak daerah.

2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono , 1985).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, antar sektor.

Menurut Lincoln Arsyad (1999), pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu.

Pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut (Arsyad, 1997).

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987), bahwa pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka

susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan, pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pada umumnya, pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irwan dan Suparmoko, 1988).

Saat ini tidak ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komperhensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori tersebut berkisar pada metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tertentu. Secara Umum, pendapat-pendapat yang mendasari bidang teori pembangunan ekonomi regional yang masing-masing mempunyai asumsi yang berbeda (Hartono, 2008) yaitu sebagai berikut:

A. Model Neo-Klasik.

Model Neo-Klasik mendasarkan analisa pada peralatan fungsi produksi, sama halnya dengan analisis pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok Neo-Klasik berpendapat bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional

adalah modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi. Namun demikian, ada kekhususnya teori pertumbuhan regional Neo-Klasik yaitu membahas secara mendalam pengaruh dari perpindahan penduduk/migrasi dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Kesimpulan dari model Neo-Klasik adalah terdapat hubungan antara pertumbuhan dari suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah (*regional disparity*) pada Negara yang bersangkutan. Kelompok Neo-Klasik mengatakan bahwa pada saat proses pembangunan baru dimulai (negara yang sedang berkembang), tingkat perbedaan kemakmuran antara wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*). Ketika proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara yang telah berkembang) maka perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah cenderung menurun (*convergen*). Alasan dikemukakan adalah bahwa lalu lintas orang dan lalu lintas modal di negara yang sedang masih belum lancar sehingga proses penyesuaian ke arah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi serta masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk, biasanya merupakan faktor utama yang menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar daerah. Sedangkan di negara-negara maju, proses penyesuaian tersebut terjadi dengan lancar karena telah tersedianya fasilitas perhubungan dan komunikasi. Kebenaran pendapat ini mula-mula diselidiki secara empiris oleh Williamson (1965).

B. Model Peyebab Kumulatif

Teori ini pada mulanya dikemukakan oleh Myrdal (1957), yang mengkritik teori Neo-Klasik mengenai pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar wilayah selamanya akan menimbulkan adanya *backwash effect* yang mendominasi *spread effect* dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang *disequilibrium*. Perbedaan utama dari teori Neo-Klasik dan teori dari Myrdal adalah, yaitu: *pertama*, menggunakan *constant return to scale*; dan *kedua*, menggunakan *increasing return to scale*. Perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah mungkin akan menjadi sangat besar jika *increasing return to scale* berlangsung terus. Menurut Kaldor (1970) bahwa prinsip-prinsip dari peyebab kumulatif adalah penyederhanaan dari *increasing return to scale* di perusahaan. Kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lain. Hal ini disebut Myrdal sebagai *backwash effects*. Berdasarkan kondisi ini, maka penganut teori *Cummulative Causation* berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar, sehingga perlu dilakukan melalui campur tangan yang efektif dari pemerintah.

C. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi, biasa disebut analisis basis digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari sektor basis pendapatan regional akan langsung meningkat bila sektor basis mengalami perluasan, sedangkan kesempatan kerja baru terasa dalam jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.

Keunggulan dari metode ini adalah dapat secara cepat mengetahui sektor-sektor yang menjadi andalan/ basis komparatif suatu perekonomian daerah. Kelemahan model ini adalah didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

D. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menanggapi bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu permukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Selama ini, perhatian utama pembangunan adalah cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara maju/ kaya maupun negara terbelakang/miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering di nilai dengan tinggi atau rendahnya dan atau kecepatan tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional yang dihasilkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan nilai pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono, 2004).

Menurut Boediono (1981:1), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek) ekonomis, suatu perekonomian berkembang/berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu output total dan jumlah penduduk.

3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan prespektif waktu, suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita.

Dalam analisisnya, Kuznets (dalam Todaro, 2003:99-106) mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui di hampir semua negara sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi total (*TFP, Total Factor Productivity*) yang tinggi yakni, output yang dihasilkan masing-masing unit input dari seluruh input atau faktor produksi yang dipergunakan untuk membuat output tersebut.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya dan atau kecepatan tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional yang dihasilkan. Namun, perhatian utama pembangunan melalui cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi ini, di sisi lain terdapat penyebaran pertumbuhan pendapatan tersebut masih sangat terbatas jangkauannya, kekuatan antara daerah/wilayah di Negara berkembang tidak seimbang, sehingga cenderung memperlebar jurang kesenjangan atau ketidakmerataan antara daerah/wilayah kaya dan daerah/wilayah miskin.

Di negara berkembang, perhatian utama terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah adalah pertumbuhan yang tinggi hanya dihasilkan atau dinikmati oleh beberapa orang. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan peningkatan GNP secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan telah meyebar ke segenap penduduk/lapisan masyarakat (Todaro, 1999).

2.1.3 Konsep Ketimpangan

Menurut Murty (dalam Yuzea, 2006), kesenjangan regional diartikan sebagai ketidakseimbangan pertumbuhan antar sektor primer, sekunder, tersier atau sektor sosial di suatu negara, distrik, atau tempat dimana peristiwa itu terjadi di negara maju

atau berkembang, negara pertanian atau industri, negara besar atau kecil, mempunyai wilayah yang maju dan tertinggal secara ekonomi.

Menurut Ahluwalia bahwa dua gambaran mengenai keadaan distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan, distribusi pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya (Sadono, 1996:61).

Distribusi pendapatan yang merata dan pertumbuhan ekonomi hingga kini masih menjadi perhatian banyak ahli ekonomi dalam konteks pembangunan, sehingga strategi pembangunan yang hanya bertumpu pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata membawa disparitas pendapatan regional yang tinggi juga. Oleh karena itu, menurut Todaro, terdapat 3 konsep tentang distribusi pendapatan, yaitu:

1. Distribusi fungsional (*the functional distribution*)

yaitu distribusi yang menunjukkan pangsa pendapatan nasional dari faktor-faktor produksi primer yang meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal.

2. Perluasan distribusi fungsional (*extended functional distribution*)

yaitu disagregasi distribusi fungsional dimana pemilik tanah, tenaga kerja, dan modal dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil.

3. Distribusi ukuran (*size distribution*)

yaitu distribusi yang mengukur pendapatan antar kelompok masyarakat berdasarkan pangsa pendapatan yang diterima.

Suatu dekade setelah hipotesis Kuznet, Williamson membuat satu langkah dengan menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional di suatu Negara, Williamson menggunakan data tabel silang dari 24 negara menemukan bahwa Negara dengan kesenjangan pendapatan wilayah terbesar selalu diikuti sekelompok Negara dengan tingkat pendapatan perkapita menengah, dimana kesenjangan wilayah yang relative kecil ditemukan baik di Negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi ataupun Negara belum berkembang. Kemudian Williamson menjelaskan hipotesa U terbalik pada lingkup wilayah: pada saat pendapatan perkapita meningkat, akan terjadi peningkatan ketimpangan wilayah, lalu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menurun. Lebih jauh Williamson menyatakan bahwa masalah mendasar pada tahap awal pertumbuhan ekonomi adalah dualisme ekonomi yang dikenal dengan masalah utara-selatan, kemudian pada tahap lanjut pertumbuhan ekonomi akan ditemukan hilangnya dikotomi utara-selatan dan adanya suatu langkah cepat menuju pemusatan wilayah. Teori ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Licorlin Arsyad (1992) bahwa penghapusan kemiskinan dan berkembang ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan.

Menurut Murty (dalam Yuzea, 2006), kesenjangan regional oleh diartikan sebagai ketidakseimbangan pertumbuhan antar sektor primer, sekunder, tersier atau sektor sosial di suatu negara, distrik, atau tempat dimana peristiwa itu terjadi. Di setiap negara apakah itu negara maju atau berkembang, negara pertanian atau industri, negara besar atau kecil, mempunyai wilayah yang maju dan tertinggal secara

ekonomi. Hal tersebut penting untuk menghubungkan pola pembangunan ekonomi regional dengan beragam variabel fisik dan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi variabel mana yang mempunyai pengaruh terbanyak terhadap pola pertumbuhan. Meskipun kesenjangan tidak berlaku di semua wilayah dengan kekuatan (tingkatan) yang sama, tetap terdapat aspek-aspek umum yang dapat memberikan beberapa generalisasi, penyebab utama kesenjangan adalah:

a. Faktor Geografis.

Apabila suatu wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumberdaya nasional, sumber energi, sumberdaya pertanian, topografi, iklim dan curah hujan tidak akan merata. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan suatu wilayah berkembang lebih baik.

b. Faktor Historis

Tingkat pembangunan suatu masyarakat juga bergantung pada masa yang lalu untuk menyiapkan masa depan. Bentuk organisasi ekonomi yang hidup di masa lalu menjadi alasan penting yang dihubungkan dengan isu insentif, untuk pekerja dan pengusaha. Sistem feodal memberikan sangat sedikit insentif untuk bekerja keras. Sistem industri dimana pekerja merasa tereksplorasi, bekerja tanpa istirahat, suatu perencanaan dan sistem yang membatasi akan memberi sedikit insentif dan menyebabkan pembangunan terhambat.

c. Faktor Politik

Ketidakstabilan politik dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat kuat. Selain itu, jika pemerintah stabil tapi lemah, korupsi dan

ketidakmampuan untuk mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan tujuan dari kebijakan pembangunan. Kondisi politik di setiap wilayah tidak sama.

d. Faktor Kebijakan Pemerintah

Belakangan ini, hampir semua negara kaya sedang diterapkan konsep Negara kesejahteraan (*welfare of state*). Di negara tersebut, kebijakan pemerintah mulai diarahkan secara langsung pada pemertaan regional yang lebih besar. Kekuatan pasar yang menghasilkan efek "backwash" dihilangkan, sementara yang menghasilkan efek menyebar didukung sementara di negara-negara miskin, kebijakan yang demikian masih sangat sedikit.

e. Faktor Administrasi (birokrasi)

Faktor administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh dalam menambah kesenjangan antar wilayah. Saat ini pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam pembangunan regional dan sebaliknya.

f. Faktor Sosial

Banyak faktor sosial yang menjadi penghalang dalam pembangunan. Penduduk di wilayah yang belum berkembang memiliki lembaga dan keinginan (*attitude*) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di lain pihak penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan yang kondusif untuk pembangunan.

g. Faktor Ekonomi

Penyebab secara ekonomis seperti perbedaan-perbedaan dalam faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar yang bebas dan efek "backwash" dan efek menyebar (*spread*) dan pasar tidak sempurna, berlangsung dan menambah kesenjangan dalam pembangunan ekonomi.

2.1.3.1 Trickle Down Effect Dan Polarization Effect

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antardaerah (Arsyad, 2004). Berikut akan dijelaskan dua teori ketimpangan wilayah, yaitu *trickle down polarization effect*; serta *backwash-spread effect*.

1. *Trickle Down Polarization Effect*

Albert O. Hirschman (1970), dalam tulisannya yang berjudul *interregional and international transmission of economic growth*, membedakan daerah di suatu Negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickle down polarization effect*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin melebar berarti terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*).

2. *Backwash-Spread Effect*

Myrdal (dalam Jhingan, 1990) menyatakan bahwa keimpangan regional dalam suatu Negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya perkembangannya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki “harapan-laba tinggi”, sementara wilayah-wilayah lain terlantar.

Menurut Myrdal, pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah disekitarnya melalui dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). Dampak balik (*backwash effect*) terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (misal: wilayah A) mengakibatkan berpindahnya sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah sekitarnya (misalnya; wilayah B). Sehingga, wilayah A (yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju dibandingkan wilayah B), akan semakin maju dan wilayah B akan semakin tertinggal. Dampak sebar (*spread effect*) terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (misal: wilayah A) mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya (misal: wilayah B), yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan setra-sentra yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang. Selanjutnya Myrdal menyimpulkan bahwa ketimpangan wilayah diakibatkan oleh lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik (Lincoln, 1997:271-280).

Hirschman mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi dipandang secara geografis keadaanya tidak seimbang yakni tidak merata ke semua daerah. Pada awalnya pertumbuhan ekonomi terpusat di beberapa daerah sedangkan pada daerah lainnya dalam keadaan terbelakang. Pada proses pertumbuhan selanjutnya perbedaan ini akan semakin lebar karena terdapat berbagai faktor yang mempersulit daerah miskin untuk berkembang, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasinya. Begitu juga jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh ke daerah lain (Lincoln, 1997:271-280).

2.1.3.2 Pengukuran Ketidakmerataan Regional

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat ketidakmerataan (disparitas), jenis pendekatan pada umumnya biasa digunakan dalam setiap studi tentang ketidakmerataan yaitu:

1. *Gini Ratio*, yang mengukur ketidakmerataan berdasarkan luas Lorenz curve.
2. *Konsep PDRB perkapita Relatif*, dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketidakmerataan wilayah pada konsep PDRB perkapita relative.
3. *Williamson Index*, yang sebenarnya hampir sama dengan ukuran ketidakmerataan yang menggunakan koefisien variasi.

2.1.3.3 Konsep PDRB perkapita Relatif

Disparitas ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketidakmerataan wilayah pada konsep PDRB perkapita relatif dengan rumus :

$$IQ.i.t = \frac{PCGDP.i.t}{PCGDP.Nas.t} - 1 \dots\dots\dots(1.1)$$

dimana : IQ_t = ketidakmerataan wilayah Provinsi i, tahun t
 $PCGDP.t$ = PDRB perkapita pada Provinsi i pada tahun t
 $PCGDP.Nal.t$ = PDB perkapita Indonesia pada tahun t

2.1.4 Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu cerminan dari negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Dewasa ini, hampir tidak ada satu negarapun di dunia ini yang menganut sistem perekonomian tertutup, hal ini disebabkan karena setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Perbedaan dalam anugerah alam (*endowment resources*) dan berbagai perbedaan lain menyebabkan suatu negara memerlukan adanya pertukaran atau perdagangan dengan negara lain.

Menurut Boediono (1983), menyatakan bahwa perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi mempunyai arti khusus :

"Perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan"

Kehendak sukarela yang telah disebut dalam pengertian perdagangan di atas menunjukkan bahwa kehendak sukarela itu didasarkan adanya keuntungan dari adanya perdagangan itu.

Perdagangan internasional terjadi bila di dalamnya terlihat akan memberikan keuntungan atau manfaat bagi kedua belah pihak atau setidaknya salah satu pihak dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Hal ini berarti pula bahwa perdagangan internasional atau pertukaran pada umumnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang melakukannya. Keuntungan yang diperoleh dari adanya perdagangan ini disebut *gain from trade*. Namun besarnya manfaat yang diperoleh masing-masing pihak yang melakukan perdagangan ditentukan oleh kekuatan masing-masing pihak dalam proses tawar-menawar (Boediono, 1983).

Suatu negara yang melakukan perdagangan dengan melakukan realokasi sumber daya yang dimilikinya secara lebih efisien, sehingga Negara tersebut dapat memproduksi suatu barang pada tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya, yang pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan jumlah barang yang akan diproduksi dan dikonsumsi, yang hasilnya kesejahteraan rakyat akan meningkat (Soelistyo, 1986).

2.1.4.1 Teori Keunggulan Absolut

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya *The Wealth of Nation*, menyatakan bahwa perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Smith berpendapat bahwa suatu

negara akan menghasilkan dan mengekspor barang dimana negara tersebut mempunyai keunggulan absolut atas negara lain. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor barang bilamana negara tersebut mempunyai kerugian absolut dalam memproduksi barang-barangnya. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam perhari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang.

Asumsi yang digunakan Adam Smith dalam analisisnya (Salvatore, 1990) adalah:

1. Berlakunya teori nilai tenaga kerja (*labor theory of value*) bagi penentuan nilai suatu barang.
2. Hanya tenaga kerja yang merupakan faktor produksi yang bersifat homogen. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja mempunyai kualitas yang sama untuk setiap bidang produksi.
3. Terdapat immobilitas faktor produksi antar negara.

Asumsi yang digunakan Adam Smith tersebut, maka suatu negara akan terdorong untuk melakukan spesialisasi terhadap faktor produksi tertentu, sehingga akan menghasilkan pertambahan produksi dunia yang akan dipakai bersama-sama melalui perdagangan internasional antar negara. Dengan demikian kebutuhan suatu negara tidak diperoleh dari pengorbanan negara-negara lain, tetapi semua negara dapat memperolehnya secara serentak (Salvatore, 1990). Demikianlah sehingga

perdagangan internasional akan memberi manfaat bagi perekonomian suatu Negara atau wilayah.

2.1.4.2 Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif Ricardo melakukan perbaikan atas teori keunggulan absolut yang belum dapat menjawab permasalahan yaitu, jika terdapat negara yang tidak memiliki keunggulan absolut dapat melakukan perdagangan. Sehingga, menurut Ricardo, keunggulan dari masing-masing negara yang melakukan perdagangan dalam konsep tersebut bersifat relatif, tidak absolut seperti dikemukakan oleh Smith sehingga negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut dapat melakukan perdagangan.

Menurut prinsip teori keunggulan komparatif, perdagangan masih dapat terjadi selama masing-masing negara mempunyai keunggulan komparatif dalam menghasilkan suatu macam komoditi. Ricardo berpendapat bahwa manfaat dari perdagangan masih ada sekalipun negara tersebut mengalami kerugian secara mutlak (Salvatore, 1990). Disini negara yang kurang efisien dalam memproduksi kedua komoditi tersebut akan melakukan spesialisasi produksi pada komoditi dengan kerugian absolut terkecil. Dengan demikian negara tersebut yang masih mempunyai keunggulan relatif akan memproduksi komoditi yang bersangkutan dibandingkan mitra dagangnya. Sebaliknya negara tersebut akan mengimpor komoditi dengan kerugian absolut yang lebih besar. Sehingga menurut Ricardo, Perdagangan antar negara masih dapat terlaksana, jika masih ada perbedaan dalam perbandingan harga relatif antara negara sebelum dilakukan perdagangan.

2.1.4.3 Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori Perdagangan Internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher (1919) dan Bertil Ohlin (1933) mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori Klasik *Comparative advantage*, menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam *productivity of labor* (faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan) antar negara (Salvatore, 2004:116). Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori perdagangan dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin (Heckscher-Ohlin), merupakan pengembangan dari teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif.

Teori Heckscher-Ohlin menekankan bahwa perdagangan internasional terutama ditentukan oleh beda relatif dari karunia alam (*factor endowment*) serta harga-harga faktor produksi antar negara. Menurut Heckscher-Ohlin, bahwa pola perdagangan dimulai dengan mengungkapkan secara spesifik tentang perbedaan harga-harga antar negara. Perbedaan harga ini terjadi, karena adanya perbedaan harga antar negara pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan proporsi penggunaan faktor produksi, kenyataan ada faktor spesifik pada masing-masing industri atau perusahaan yang menyebabkan perbedaan, misalnya kemampuan manajerial yang tinggi, dan pada tahap selanjutnya hal tersebut dianggap sebagai faktor produksi. Faktor produksi lain misalnya teknologi, pengetahuan, hak paten dan lain sebagainya (Soelistyo, 1986).

Teori Heckscher-Ohlin mengemukakan konsepnya yang dapat disimpulkan:

- a. Perdagangan internasional/antar negara tidaklah banyak berbeda dan hanya kelanjutan saja dari perdagangan antar daerah. Perbedaan pokoknya terletak pada masalah jarak. Atas dasar inilah maka H-O melepaskan anggapan (yang berasal dari teori klasik) bahwa dalam perdagangan internasional ongkos transport dapat diabaikan.
- b. Barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan (*natural and acquired advantages* dari Adam Smith) akan tetapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang itu.

2.1.4 Hubungan Perdagangan Bebas dengan Ketimpangan Pembangunan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 telah membuka kesadaran kita akan pentingnya makna ketergantungan antara suatu Negara terhadap Negara lain yang membentuk suatu liberalisasi perdagangan (Mardiasmo, 2000). Sehingga, ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan lagi dengan trend perkembangan ekonomi terhadap Negara lain.

Liberalisasi perdagangan ini berawal dari kesepakatan tanggal 8 oktober 2003 pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun, dimana Indonesia, Brunei Darusalam, Malaysia, Philipina Singapura

dan Thailand sepakat mencapai target bea masuk dengan tariff 0% minimal 60%. Liberalisasi perdagangan bertujuan meningkatkan perdagangan antar Negara anggota ASEAN (intra-ASEAN trade), dan menarik lebih banyak penanaman modal asing (PMA). Hal ini, liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Menurut Muhammad Sood, (1995), liberalisasi perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Suatu Negara sulit untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, pembagian kerja menjadi semakin mantap, sehingga perkembangan spesialisasi menjadi semakin pesat. Sebagian akibatnya semakin meningkat pula produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan spesialisasi berarti pula perkembangan perdagangan.

Kebijakan perdagangan bebas (liberalisasi) sebagai tonggak perundingan perdagangan multilateral sejak GATT (sekarang Organisasi Perdagangan Dunia/OPD atau *World Trade Organization/WTO*) berakar dari teori keunggulan komparatif (Ricardo 1821) dan analisis dampak tarif dan kuota impor. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang apabila biaya yang dibutuhkan lebih

kecil daripada negara lain. Dengan demikian, perdagangan antara dua negara akan menguntungkan karena setiap negara dimungkinkan mengkhususkan diri pada produksi barang tertentu secara efisien.

Budiono (2001) menyebutkan terdapat lima manfaat dibukanya liberalisasi perdagangan yaitu:

1. Akses pasar yang lebih luas sehingga memungkinkan diperoleh inefisiensi karena liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang menjadi lokasi berbagai kegiatan industry yang saling terkait dan saling menunjang sehingga biaya produksi dapat diturunkan.
2. Iklim usaha menjadi kompetitif sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat *rent seeking* dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bukan bagaimana menghapus fasilitas dari pemerintah.
3. Arus perdagangan dan investasi yang lebih bebas mempermudah proses alih teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
4. Perdagangan yang lebih bebas memberikan signal harga yang lebih benar sehingga meningkatkan efisiensi investasi.
5. Perdagangan yang lebih bebas kesejahteraan konsumen meningkat karena terbuka pilihan-pilihan baru. Namun untuk berjalan dengan lancar, suatu pasar yang kompetitif perlu dukungan perundang-

undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan melarang praktek monopoli.

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional pada tataran global (GATT-WTO) maupun regional (AFTA, APEC dan CAFTA) bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama sektor usaha industri kecil dan menengah baik secara nasional maupun internasional yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional (Muhammad, 1995). Sehingga, kebijaksanaan tersebut dapat terciptanya pertumbuhan yang tinggi disertai dengan pemerataan pendapatan di suatu Negara.

Indonesia telah menentukan arah kebijaksanaan di bidang hukum yang mendukung kegiatan ekonomi, sebagaimana dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, Tap MPR No.IV/MPR/1999, untuk mengantisipasi liberalisasi perdagangan internasional. Hal ini telah dinyatakan dalam butir 7, bahwa Indonesia harus mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Feridhanusetyawan dan Pangestu (2003), manfaat proses liberalisasi perdagangan menyebutkan pembentukan AFTA diperkirakan hanya memberikan tambahan relatif kecil bagi Indonesia ataupun Negara anggota ASEAN karena wilayah pasar ASEAN relative kecil. Disamping itu, perdagangan anggota ASEAN lebih banyak dilakukan dengan Negara non-ASEAN. Padahal kesepakatan penurunan

tariff berlaku hanya bagi Negara-negara ASEAN. Akibatnya penurunan tariff melalui AFTA tidak efektif (Hardono dkk, 2004).

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemertaaan dan memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (Sood 1995).

Aktivitas perdagangan dan investasi dinyakini sangat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dimana *multiplier effect* yang ditimbulkan sangat besar melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sector. Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong lajunya perekonomian daerah dan meningkatnya kesejahteraan.

Dampak dari liberalisasi perdagangan ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum, ada tiga wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni (Tambunan, 2004):

1. Ekspor

Dampak positifnya adalah ekspor dari suatu negara meningkat, sedangkan dampak negatifnya adalah ekspor dari suatu negara menurun, selanjutnya volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurun

2. Impor

Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk dalam negeri..

3. Investasi

Jika daya saing investasi negara tersebut rendah, dalam arti iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka arus modal ke dalam negeri akan berkurang dan modal investasi domestik akan lari dari Negara. Sehingga, akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran negara tersebut negatif.

Ketiga jenis dampak tersebut secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari liberalisasi perdagangan ekonomi dunia terhadap perekonomian.

Penelitian Rui HAO dan Zheng WEI (2007) menunjukkan sebelum era reformasi liberalisasi perdagangan berhubungan negatif tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Cina. Sedangkan setelah era reformasi terjadi hubungan positif signifikan antara liberalisasi perdagangan, terhadap disparitas pendapatan di Cina. Sejalan dengan penelitian Marie DAUMAL (2010) bahwa terjadi hubungan positif signifikan antara liberalisasi perdagangan terhadap disparitas pendapatan di India.

2.1.5 Hubungan Investasi Asing dengan Ketimpangan Pembangunan

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing (Sarwedi, 2002).

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya UU PMA dan PMDN pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas (Cawley, 1981).

Sumber pembiayaan Penanaman Modal Asing (PMA, *Foreign Direct Investment*), merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yang lain. Panayotou (1998) menjelaskan bahwa PMA lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya PMA disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*.

PMA berperan penting dalam pembentukan modal pembangunan. Hal ini mengingat bahwa untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu diperlukan sejumlah investasi. Tabungan domestik Indonesia untuk saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan investasi, sehingga diperlukan modal asing untuk menutup kesenjangan investasi, atau *investment – saving gap*. Kebijakan pemerintah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri karena besarnya cicilan utang yang membebani APBN, menjadi alasan mengapa peran PMA sangat diperlukan.

Penanaman modal asing adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain (Krugman, 1991). Pengertian PMA menurut UU No. 1 Tahun 1967, adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga sebagai diversifikasi usaha. (Brooks, et, al, 2003). Hasil yang diharapkan dari aliran modal internasional adalah meningkatnya *output* dan kesejahteraan dunia. Disamping peningkatan *income* dan *output*, keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah:

1. Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir.

Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan.

2. Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan.

Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (*non-tradable sector*) meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

3. Investasi asing menghasilkan investasi domestik.

Dalam analisis terhadap 58 negara berkembang, Bosworth dan Collin (1999) menemukan bahwa sekitar setengah dari setiap dollar aliran modal menyebabkan meningkatnya investasi domestik.

4. Investasi asing memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan akses pasar karena skala ekonomis

5. Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan (*investment gap*). Masuknya investasi asing dapat mengatasi masalah tidak tercukupinya valuta asing yang digunakan untuk membiayai impor faktor produksi dari luar negeri.

Feldstein (2000) meyakini bahwa sebagai salah satu jenis aliran modal bebas, PMA (*Foreign Direct Investment*) memiliki beberapa keuntungan. *Pertama*, aliran modal tersebut mengurangi risiko dari kepemilikan modal dengan melakukan devesifikasi melalui investasi. *Kedua*, integrasi global pasar modal dapat memberikan

spread terbaik dalam pembentukan *corporate governance*, *accounting rules*, dan legalitas. *Ketiga*, mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah. Disamping keuntungan tersebut diatas, negara penerima (*host country*) akan menerima keuntungan antara lain:

“FDI allows the transfer of technology – particularly in the form of new varieties of capital inputs – that cannot be achieved through financial investment or trade in goods and services. FDI can also promote competition in the domestic output market. Recipients of FDI often gain employee training in the course of operating new businesses, which contributes to human capital development in the host country. Profit generated by FDI contribute to corporate tax revenues in the host country”.

Argumen di atas memperkuat pandangan ekonom Krugman (1998) yang menyebutkan bahwa FDI tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam *corporate governance mechanism*.

Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa ahli telah memperkuat argumen bahwa peranan FDI relatif besar dalam pembangunan suatu negara. Penelitian Terpstra dan Yu (1988) menemukan bahwa ukuran pasar (*market size*) yang diukur dengan GDP perkapita, faktor kedekatan geografis negara penerima dan penanam modal, besarnya perusahaan, reaksi oligopolistik merupakan faktor penentu masuknya modal asing ke suatu negara. Penelitian Rana dan Dowling (1988) mengenai pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara sedang berkembang, menyimpulkan bahwa modal asing

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan tabungan domestik di negara-negara berkembang di Asia (Sarwedi, 2002).

Investasi merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya akumulasi modal dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan di masa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi akan mengalir ke wilayah dengan *rate of return* yang tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga investasi akan terkonsentrasi ke wilayah dengan kriteria tersebut. Investasi yang terkonsentrasi tanpa adanya pemerataan akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi akan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah dengan konsentrasi ekonomi yang rendah (Srafizal 2008). Hal ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah.

Menurut Myrdal (Jhingan, 1993) menyatakan bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya Investasi, dimana pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena Pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta Lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan Banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi Yang dimiliki oleh suatu daerah (Sjafrizal, 2008). Perbedaan inilah yang akan Menyebabkan ketidakmerataan antar wilayah menjadi semakin lebar.

Menurut Myrdal (dalam Jhingan, 1993), investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerahdaerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah (Sjafrizal, 2008). Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke dalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah (kaya sumber daya) justru akan menyebabkan ketidakmerataan.

Ketimpangan antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang (Sjafrizal,2008). Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan daerah, yang dalam hal ini akan mengakibatkan proses ketimpangan.

Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan daerah.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003), kesenjangan mengarah pada standar hidup relative dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2003).

Penyebaran investasi swasta yang berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing antar daerah berbeda yang disebabkan ketersediaan fasilitas/ sarana dan prasarana di daerah. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan juga berbeda-beda antar daerah. Persebaran kegiatan penanaman modal yang tidak merata menyebabkan perputaran kegiatan penanaman modal yang tidak merata menyebabkan perputaran kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk antar daerah menjadi tidak seimbang (Tantia, 2002)

2.1.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dapat dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari satu

kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2005).

Sadono Sukirno (1985), laju pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan dalam produk domestik regional bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada pertambahan jumlah penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi daerah ini oleh para ahli biasanya diartikan sama dengan pembangunan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan nilai pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono, 2004). Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah (Todaro, 2003) :

1. Akumulasi Modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan Penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Menurut Boediono (1981:1), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek) ekonomis, suatu perekonomian berkembang/berubah dari waktu ke waktu. (2) Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu output total dan jumlah penduduk. (3) Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan prespektif waktu, suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita.

Profesor Simon Kuznets memberikan suatu definisi mengenai pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2003). Ketiga komponen pokok dari definisi tersebut yaitu :

1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) dari suatu negara.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

3. Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru.

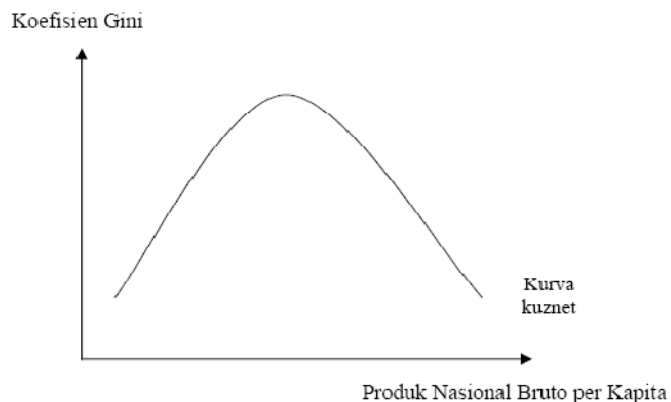
Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal,2008). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Kuncoro, 2006).

Simon Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets gambar 1.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

Gambar 1.2
Kurva Kuznet



Sumber: Todaro, 2003

Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) meneliti hubungan disparitas terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyumas, menggunakan Indeks Williamson sebagai ukuran disparitas. menunjukkan bahwa pada awal pertumbuhan disparitas memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya disparitas menurun. Namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali.

Menurut Kuznets bahwa pertumbuhan di negara-negara maju tidak menyebabkan negara-negara berkembang ikut tumbuh. Alasan yang mendasar, negara berkembang tidak mampu mengikuti pertumbuhan negara-negara maju tersebut, sehingga terjadi kesenjangan antarnegara maju dan negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya (Todaro, 2006).

Menurut Hirschman (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa terjadi di seluruh wilayah pada saat bersamaan. Ketika pertumbuhan terjadi, kekuatan yang ada akan terkonsentrasi di sekitar pusat pertumbuhan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan, ketimpangan pertumbuhan antar wilayah adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa kemajuaan di satu titik (wilayah) akan mengakibatkan tekanan, ketegangan dan paksaan untuk terjadinya pada satu wilayah saja, maka kekuatan yang mengakibatkan terjadinya “transmisi” pertumbuhan dari satu wilayah (Negara, daerah) ke wilayah lain akan menjadi sangat lemah.

Dalam laporan pembangunan dunia tahun 2006, publikasi world bank, dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar Negara)

merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka panjang. Dua saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh-pengaruh kesempatan yang timpang ketika kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai konsekuensi ketimpangan untuk kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat.

2.1.7 Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Pembangunan

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (revisi dari UU no 22/1999 dan UU no 25/1999), yang diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi, dimana pola sentralisasi pada semua aspek membawa dampak tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang rentangnya yang terlalu panjang.

Menurut pasal 1 ayat 7 UU No.32 tahun 2004, “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari definisi tersebut, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, yustisi,

moneter, dan fiskal nasional serta agama. Pembagian kewenangan tersebut, bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karena itu ada tiga prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa serta dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Secara teoritis, desentralisasi mempunyai dua manfaat nyata, yaitu: *Pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di daerah masing-masing. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produksi melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap (Mardiasmo 2002:6).

Menurut Mohammad, pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Barzelay, 19991), yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan

Menurut Sjafrizal (2008) bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Penelitiannya sebelumnya telah dilakukan oleh Vibiz Regional Research (2008) mengenai efektifitas faktor input dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut ditemukan bahwa dengan menggunakan indeks Williamson, ketimpangan pada ke-33 Provinsi di Indonesia semakin tinggi setelah adanya desentralisasi fiskal. Jamie Bonet (2006) juga pernah meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan wilayah dengan bukti pengalaman dari negara Kolombia. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bonet membuktikan bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lessmann (2006) yang menganalisis mengenai “Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional: Menggunakan Pendekatan Data Panel Pada Negara-Negara OECD”. Dalam penelitiannya Lessmann menemukan bahwa derajat dari desentralisasi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketimpangan regional. Jadi, wilayah-wilayah terbelakang atau miskin tidak akan dirugikan dari adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya.

Menurut Barl dan Linn (1992) menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena daerah lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, maka pengeluaran infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi menurut

pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat.

Argumentasi lain yang mendasari desentralisasi adalah munculnya kompetisi atau persaingan antar daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahnya (Davoodi dan Zou, 1998). Sejalan dengan itu, mengutip Oates, Wibowo (2008) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi (Aan Zulyanto, 2010).

Meskipun demikian, Thiessen (dalam Aan Zulyanto, 2010), juga memberikan berbagai padangan yang memperingatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai berikut;

1. Desentralisasi fiskal dapat memperkuat kesenjangan regional dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan atas tingkat pendapatan dan basis pajak antara wilayah dan daerah. Selanjutnya akan mendorong perbedaan dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan dan pelayanan public lainnya serta mencegah penggunaan faktor-faktor produksi secara penuh termasuk modal manusia. Daerah kaya umumnya akan menyediakan layanan publik yang lebih baik, selain itu terdapat kecenderungan masyarakat daerah kaya untuk menghalau masuknya masyarakat yang berpendapatan rendah. Adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam penyediaan barang publik yang mencakup

kepentingan masyarakat secara luas dan lintas daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi perkapita.

2. Desentralisasi fiskal dapat menghasilkan keputusan-keputusan pemerintah dengan kualitas rendah, lebih banyak korupsi, dan meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok yang berkepentingan (*vested interest*). Beberapa ahli berpendapat bahwa pemerintah pusat secara umum dapat mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi: mereka dapat menarik lebih banyak orang yang memenuhi syarat karena peluang karier dan gaji yang lebih baik (Prud'homme, 1994). Selain itu, ada kasus-kasus dimana demokrasi lokal mungkin menawarkan kontrol yang kurang efektif oleh pejabat terpilih, karena pejabat di tingkat lokal lebih dekat kepada orang-orang yang karena itu mungkin lebih rentan terhadap pengaruh pribadi dan korupsi. Jika kualitas pemerintah menurun, maka desentralisasi dapat meningkatkan inefisiensi.
3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada negara-negara kecil dan berpendapatan rendah cenderung akan merugikan. Untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dibutuhkan biaya tetap yang tidak sedikit sehingga dapat menghabiskan sebagian besar kapasitas anggaran yang sangat terbatas (Prud'homme, 1994). Selain itu, Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa terdapat ambang batas tingkat pembangunan ekonomi yang diperlukan agar desentralisasi fiskal dapat memberikan hasil memuaskan. Ambang batas ini bukan hanya karena adanya biaya tetap desentralisasi fiskal, tetapi juga karena pada tingkat pendapatan

perkapita rendah, kebutuhan untuk penyediaan barang dan jasa publik terfokus pada sedikit barang, sehingga mungkin secara umum tuntutan masyarakat *relative homogeny*. Perbedaan dalam preferensi individu untuk barang dan jasa publik juga mungkin relatif kecil sehingga pemerintah pusat memiliki semua informasi yang diperlukan untuk menciptakan efisiensi konsumsi dan produksi.

4. Desentralisasi fiskal dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan membuat kebijakan stabilitas lebih sulit dilakukan berkaitan dengan penyesuaian fiskal untuk mengurangi ketimpangan struktural. Desentralisasi fiskal bahkan mungkin mendorong dan memperburuk ketimpangan struktural tersebut (Tanzi, 1995); salah satu contoh ekstrem adalah ketika pemerintah daerah tertentu memberikan pembebasan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang lain. Tindakan ini dapat memicu ketidakstabilan antar daerah. Disamping itu, koordinasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda mungkin sulit untuk dilakukan secara efektif dan tepat waktu, sehingga dalam jangka panjang berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Prud'homme (1995) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain:

- a) Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
- b) Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
- c) Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.
- d) Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

2.1.7.1 Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal ialah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*) (Prawirosetoto, 2002).

Philip dan Woller (1997) menggunakan beberapa variabel berikut sebagai representasi desentralisasi fiskal yaitu rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah, rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah tidak termasuk pengeluaran pertahanan dan tunjangan social, dan rasio penerimaan daerah terhadap total penerimaan pemerintah, dan rasio penerimaan daerah tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator desentralisasi fiskal dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

Penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal (Ebel dan Yilmaz, 2002). Slinko (2002) memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai hal ini.

“the problem with the expenditure decentralization is that local government usually doesn’t have degree of autonomy but act on behalf of the regional and federal governments. We also have problems with the revenue side estimation of fiscal decentralization since those also could be not the consequence of municipal ability to rise and assign taxes and assign taxes, but the consequence of the revenue-sharing policy of regional government.”

Meskipun kedua variabel tersebut bukanlah indikator desentralisasi fiskal yang sempurna, penelitian ini akan menggunakan share penerimaan daerah (penerimaan asli daerah) terhadap total penerimaan daerah untuk mengukur kemandirian fiskal daerah. Pemilihan sisi penerimaan sebagai indikator desentralisasi fiskal dikarenakan keterbatasan data yang tersedia dari sisi pengeluaran. Beberapa peneliti yang menggunakan penerimaan pemerintah sebagai indikator untuk mengukur desentralisasi fiskal adalah Jin dan Zhou (2002), Slinko (2002), dan Akai dan Sakata (2005).

2.1.7.1.2 Penerimaan Pemerintah

Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut UU No. 25/1999 dan UU No.33/ 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari

pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan (Nurcholis, 2005).

2.1.7.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dalam Erlangga A. landiyanto (2005), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggalai sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi di era otonomi adalah legal dengan tetap mematuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak dan retribusi daerah tidak distorsif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Simanjuntak, 2005).

Berdasarkan UU No. 33/2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pajak daerah dan retribusi

daerah merupakan aspek pendapatan yang paling utama dalam PAD karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan.

2.1.7.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan pusat dan daerah, yang terdiri dari dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

1. Dana Bagi Hasil

1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam UU No. 32/2004 pasal 11 disebutkan bahwa bagian daerah dari bagi hasil pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) perorangan dalam negeri.

1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Sesuai dengan UU No.33/2004, SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum (seperti batu bara, nikel, emas, dsb), hasil hutan dan hasil perikanan. Jadi, daerah yang tidak memiliki SDA atau yang tidak berada dalam satu propinsi dengan daerah kaya, pada dsarnya tidak akan memperoleh bagian (Simanjuntak, 2005).

1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan public diantra pemerintah daerah di Indonesia. Secara implicit, DAU

bertujuan untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah sebagai akibat bagi hasil pajak dan SDA yang tidak merata. DAU untuk suatu wilayah dialokasikan atas dasar celah fiskal (fiskal gap) dan alokasi dasar (Simanjuntak, 2005).

1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana perimbangan yang berasal dari APBN (Hanif Nurcholis, 2005). Criteria umum DAK adalah pembiayaan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional di daerah, dimana sumbernya dinyatakan secara spesifik. DAK dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan bias dituangkan dalam formula dan variabel-variabelnya sebagaimana halnya DAU.

2.1.7.1.5 Lain-Lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat (Nurcholis, 2005). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2.1.8 Hubungan Pajak Daerah dengan Ketimpangan Pembangunan

UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang diharapkan membawa dampak terhadap pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang rentangnya yang terlalu panjang. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan (*expenditure*) secara mandiri. Desentralisasi keuangan dalam prakteknya terdiri dari bentuk, termasuk:

1. Pendanaan mandiri
2. Menjalinkan kerjasama pendanaandengan pihak swasta dalam penyediaan dan infrastruktur
3. Ekspansi sumber pendapatan daerah melalui beberapa retribusi
4. Dana bagi hasil dari pemerintah pusat
5. Utang luar negeri

Dua dimensi sebagaimana telah disebutkan diatas dalam konsep desentralisasi di Indonesia sangat menekankan pada pemeritah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara otonom untuk memenuhi permintaan layanan masyarakat.

Daerah (kabupaten dan kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasang. Adanya

kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002).

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Penyelenggaraan otonomi daerah itu menurut kemampuan pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi daerah dengan harapan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dana pembangunan yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tentunya harus diimbangi dengan penerimaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah tersebut, membutuhkan biaya yang semakin bertambah sehingga pemerintah harus mengusahakan sumber pendanaan yang bersumber dari pajak atau pungutan yang lainnya. Pungutan pajak diharapkan dapat menjadi andalan dari penerimaan dalam negeri, sehingga dapat memperkuat kemandirian daerah dalam membiayai segala kegiatan dalam pembangunan dengan mengandalkan pajak dalam tulang punggungnya (Veronika, 2003).

Menurut Andriani (Sudarsono, 1999), pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara menurut Mangkusubroto (1998), pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan

tersebut berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan pada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Dalam sistem keuangan Negara, pajak merupakan bagian yang cukup penting sebagai penerimaan Negara dalam anggaran suatu Negara (Pandiangan, 2002). Indonesia telah lama menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 diamanatkan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan para pendiri Negara (*founding father*) telah menempatkan pajak dalam konstitusi Negara. Walaupun penarikan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat, namun pada akhirnya pajak digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sehingga disini peran pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi sangat penting (Miyasto, dkk, 1990) oleh karenanya diperlukan struktur pajak yang baik.

Mengenai pajak yang baik, jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa suatu peraturan pajak yang adil harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. *Equality and equity* (kesamaan dan keadilan)

Artinya bahwa dalam keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty* (kepastian hukum)

Artinya dalam membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. *Convenience of payment* (ketetapan)

Artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan dikenakan wajib pajak (convenient).

4. *Economics of collection*

Artinya dalam membuat undang-undang pajak yang baru, para konseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relative lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk (Sumitro, 1990: 15-27).

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya (Kaho, 1997:61; Suparmoko, 2002:16). Sehubungan dengan keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Sehubungan hal tersebut, daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangan sendiri.

Musgrave membagi peranan pemerintah menjadi tiga bagian, yaitu peran alokasi, peran distribusi (Stiglitz, 2000). Khusus untuk peran distribusi, pemerintah dapat melakukan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan secara langsung dapat dilakukan dengan menerapkan pajak progresif, sedangkan kebijakan tidak langsung dapat dilakukan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah (Mangkusubroto, 1999).

Menurut Musgrave (1999), proses redistribusi secara langsung dapat dilakukan secara melalui peralatan fiskal, yaitu:

1. Suatu skema pemindahan pajak yang menggabungkan pajak progresif terhadap keluarga berpendapatan tinggi dengan subsidi bagi keluarga berpendapatan rendah
2. Pajak penghasilan progresif yang digunakan untuk membiayai pelayanan umum, terutama hal-hal seperti perumahan rakyat, khususnya yang menguntungkan bagi keluarga berpendapatan rendah
3. Suatu kombinasi antara pajak barang-barang yang kebanyakan dibeli oleh konsumen berpendapatan tinggi, dengan subsidi terhadap barang-barang lain yang terutama digunakan konsumen berpendapatan rendah.

Untuk memilih berbagai instrument kebijakan tersebut perlu diperhitungkan adanya *deadweight losses* atau biaya efisiensi, yaitu biaya-biaya yang timbul jika pilihan konsumen atau produsen dipengaruhi.

Menurut Todaro dan Smith (2003), ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya mendistribusikan pendapatan, yaitu:

1. Perbaikan distribusi fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga factor produksi secara epositif atau menghilangkan distorsi-distorsi harga factor.
2. Perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif kepemilikan asset-aset,
3. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui pajak pajk pendapatan dan kekayaan yang progresif
4. Peningkatan ukuran distribusi kelompok termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan barang da jasa konsumsi atas tanggungan pemerintah.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan. Sehingga semua golongan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.

Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa ahli telah memperkuat argumen bahwa peranan pajak daerah relatif besar dalam penurunan ketidakmerataan pembangunan. Penelitian Siti parhah (2006) yang berjudul “Pengaruh Variable Makroekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia” menemukan bahwa tax ratio mempunyai efek progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, peran pemerintah harus terus mengoptimalkan penerimaaanya

yang bersumber dari pajak, karena pajak terbukti mampu menjadi instrument redistribusi.

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, Dalam sistem desentralisasi, Pungutan pajak ini harus berdasarkan *Equality and equity* (kesamaan dan keadilan), sehingga pembangunan di setiap daerah terkontrol atau dengan kata lain ketidakmerataan pendapatan dapat teratasi.

2.1.9 Hubungan Krisis Ekonomi dengan Ketimpangan Pembangunan

Kondisi krisis ekonomi adalah penggambaran situasi dan segala aspek yang menyangkut perekonomian saat krissi. Gambaran krisis ekonomi secara nasional adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, tingkat inflasi menjulang tinggi, angka pengangguran semakin meningkat, sistem perbankan ambruk, krisis politik semakin mengguncang dan berbagai persoalan bersifat kualitatif yang mempengaruhi Negara.

Krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, yang diawali dengan krisis nilai tukar terhadap dolar AS dan krisis moneter, telah mengakibatkan perekonomian di Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi yang besar dan lama. Krisis ini berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya yang pernah dialami Indonesia

sejak orde baru, sangat berpengaruh negatif terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam negeri (Thulus, 1999;171).

Dalam analisis regresi sering sekali terjadi bahwa variable tak bebas dipengaruhi tidak hanya oleh variabel yang dapat segera dinyatakan secara kualitatif pada skala yang didefinisikan dengan baik (misalnya, pendapatan, hasil,dll) tapi juga dengan variabel yang pada dasarnya bersifat kualitatif (misalnya jenis kelamin, ras, wanita dll). Variable binary dapat digunakan dalam model regresi semudah variabel kuantitatif. Pada kenyataanya, suatu model regresi berisi variabel yang menjelaskan yang secara eksklusif bersifat binary, atau pada dasarnya kualitatif. Model seperti itu disebut model analisis varians (AOV) (Gujarati, 2003).

Kondisi krisis ekonomi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai variabel binary, karena diharapkan sebagai suatu variabel yang dapat menjelaskan secara kualitatif dalam persamaan regresi. pada penelitian ini kondisi sebelum krisis ekonomi dinyatakan dengan angka 0 dan kondisi selama krisis dinyatakan dengan angka 1. Hal ini, adanya dugaan bahwa hubungan antar variabel akan berubah sejalan dengan adanya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah perubahan hubungan struktural dalam analisis tingkat ketimpangan pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehubungannya adanya krisis tahun 1997 di Indonesia.

Cara mengkuatifikasi variable kualitatif adalah dengan membentuk variable artificial dengan nilai 1 disebut *included group* atau 0 disebut *excluded group*, penggunaan CHOW *test* untuk menguji stabilitas structural suatu model regresi

(analisis multivariate). Pada penelitian ini, sample ini dibagi menjadi dua periode yaitu 1996Q1-1998Q4 dan 1999Q1- 2008Q4. Hasil CHOW *test* menunjukkan adanya perbedaan regresi antara dua periode ini. Namun demikian, tidak dapat menjelaskan apakah perbedaan kedua regresi oleh karena perbedaan pada *intercept*-nya atau *slope coefficient* atau keduanya. Mengetahui hal ini sangat penting untuk interpretasi lebih lanjut (Ghozali, 2006).

Perbedaan regresi pada dua periode pengamatan dapat terjadi karena empat kemungkinan :

1. *Coincident regression* adalah baik *intercept* dan *slope* koefisien kedua regresi adalah sama.
2. *Parallel regression* adalah *intercept* kedua regresi berbeda sedangkan *slope* koefisien kedua regresi sama.
3. *Concurrent regression* adalah *intercept* kedua regresi sama, tetapi *slope* koefisien kedua regresi berbeda.
4. *Dissimilar regression* adalah *intercept* dan *slope* koefisien kedua regresi berbeda.

Bentuk model regresi dengan *binary variable* sebagai berikut :

$$Y_t = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 (DX_1) + \mu \dots \dots \dots (1.2)$$

Untuk melihat implikasi dari persamaan ini anggaplah bahwa $E(\mu) = 0$, maka akan diperoleh

- *Inequality function* untuk 1996Q1-1998Q4

$$E(Y_t) / D_t=0 = \alpha_1 + \beta_1 X_t \dots\dots\dots(1.3)$$

- *Inequality function* untuk 1999Q1- 2008Q4

$$E(Y_t) / D_t=1 = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\beta_1 + \beta_2) X_t \dots\dots\dots(1.4)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan (disparitas) dan desentralisasi fiskal, diantaranya: Jaime Bonet (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Fiskal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience”. Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan data panel data untuk periode tahun 1990-2000 di Kolombia. Model yang digunakan diadaptasi dari teori hubungan desentralisasi dan disparitas pendapatan regional (*in pure system* dan *a non-pure system*) dan mengikuti Qiao et al. (2002) sehingga di dapatkan model $I_{it} = \alpha_{oi} + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 CV_{it} + \epsilon_i$ dimana I_{it} adalah disparitas pendapatan regional, FD_{it} adalah desentralisasi fiskal, dan CV_{it} adalah variabel kontrol (aglomerasi dan perdagangan bebas). Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa pengalaman di kolombia pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal meningkat di tiap daerah, akan tetapi di sisi lain pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut meningkatkan

disparitas pendapatan antar wilayah secara signifikan. Kemudian variabel kontrol juga berdampak negatif terhadap disparitas pendapatan regional secara signifikan.

Marie Daumal (2010) melakukan penelitian yang berjudul "The Impact Of Trade Openness on Regional Inequality; the cases of India and Brazil". Penelitian ini menggunakan metode VECM (*Vector Error Correction Model*) dengan menggunakan data *time series* untuk periode tahun 1980-2003 di India dan periode tahun 1985-2003 di Brazil. Model yang digunakan diadaptasi dari Milanovic (2005) sehingga di dapatkan model $\ln Iq_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln openness_t + \alpha_2 \ln fdi_t + \alpha_3 \ln GDPcapita_t + U_t$ dimana $\ln Iq_t$ adalah disparitas pendapatan regional, $\ln openness_t$ adalah perdagangan bebas, $\ln fdi_t$ adalah fdi (Foreign Direct Investment), dan $\ln GDPcapita_t$ adalah GDPcapita India dan Brazil. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa setelah *Opening Up*, terjadi hubungan positif antara perdagangan bebas dengan disparitas pendapatan di India. Sedangkan, di Brazil terjadi hubungan negatif antara perdagangan bebas dengan disparitas pendapatan antar wilayah di Brazil.

Rui HAO dan Zheng WEI (2007) melakukan penelitian yang berjudul "Fundamental Causes Of Inland-Coastal Income Inequality in Post-Reform China". Penelitian ini menggunakan metode estimasi ekonometrik analisis time series tahun 1952-2004 dimana tahun 1958-1977 adalah era sebelum reformasi dan tahun 1978-2004 adalah era reformasi. Model yang digunakan diadaptasi dari Kanbur dan Zhang (2004) untuk mengetahui jangka panjang dampak 3 variabel kebijakan terhadap ketidakmerataan pendapatan wilayah pinggir dan wilayah tengah di cina, sehingga model di dapat sehingga di dapatkan model $ICGAP_t = \alpha_{oi} + \beta_1 global_t + \beta_2 decen_t +$

$\beta_3 \text{market}_t + \varepsilon_{it}$ dimana $ICGAP_t$ adalah disparitas pendapatan regional, $DECEN_t$ adalah desentralisasi fiskal, $global_t$ adalah liberalisasi perdagangan diukur dari rasio perdagangan (ekspor dan impor), dan $market_t$ adalah *marketization* diukur dari investasi asing. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa sebelum era reformasi liberalisasi perdagangan berhubungan negatif tidak signifikan dan *market* (*nsoepr*) berhubungan negatif signifikan terhadap disparitas pendapatan di Cina. Sedangkan setelah era reformasi terjadi hubungan positif signifikan antara liberalisasi perdagangan, desentralisasi, dan *marketization* terhadap disparitas pendapatan di Cina. Pada analisis menggunakan data panel yang digunakan untuk menilai eksternalitas (*spillover effect*), diadaptasi dari Fu (2004) $ICGAP_{it} = \alpha_{oi} + \beta_1 global_{it} + \beta_2 decen_{it} + \beta_3 market_{it} + \delta diffusion_{it} + \theta d9100 + \eta_i + \varepsilon_{it}$. Dimana $ICGAP_t$ adalah disparitas pendapatan, $global_{it}$ adalah liberalisasi perdagangan, $decen_{it}$ adalah desentralisasi, $market_{it}$ adalah *marketization*, $\delta diffusion_{it}$ adalah eksternalitas, $\theta d9100$ adalah binary variabel, η_i adalah *benchmark*. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa liberalisasi perdagangan, desentralisasi, *marketization* mempunyai hubungan positif terhadap disparitas pendapatan di Cina.

Christian Lessmann (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries”. Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan data panel data untuk periode tahun 1980-2001 di 17 OECD. Model yang digunakan diadaptasi dari teori Kuznet (1955) sehingga didapatkan model $I_{it} = \alpha + \beta CV_i + \gamma FD + \varepsilon_{it}$ dimana I_{it} adalah disparitas pendapatan regional, FD_{it} adalah desentralisasi

fiskal , dan CV_{it} adalah variabel kontrol. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa secara umum desentralisasi di negara miskin kemungkinan berbahaya pada daerah tersebut. Alasannya karena meningkatkan korupsi, dan mengambil resiko memdayagunakan penduduk dan perusahaan setempat. Kemudian di eropa barat desentralisasi berdampak positif disparitas pendapatan antar wilayah, tapi hasil ini ternyata tidak signifikan. Alasan berdampak positif; perbedaan latar belakang yang sulit dengan *centralized, communist fiskal organization*, dan pertumbuhan sangat cepat pusat aglomerasi.

Christian Lessmann (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Fiskal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Cross-section and Panel Data”. Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan *cross-section* dan *panel data* untuk periode tahun 1982-2000. analisis *cross-section* menggunakan 23 OECD dan 17 OECD untuk analisis *panel data*. Model yang digunakan dalam analisis *cross-section* mengikuti pendekatan Shakar dan Shah (2003) dan Gil Canaletta (2004) dalam membentuk model sehingga di dapatkan model $RD_i = \alpha + \beta C_i + \gamma DEC_i + \varepsilon_i$ dimana RD_i adalah disparitas pendapatan di negara, DEC_i adalah desentralisasi fiskal , dan C_i adalah variabel kontrol. Sedangkan, Model yang digunakan dalam analisis *panel data*, latar belakang persamaan estimasi melihat dengan cara yang sama untuk *cross-country analysis*, sehingga di dapatkan model $RD_{it} = \alpha_i + \beta C_{it} + \gamma DEC_{it} + \varepsilon_{it}$ dimana RD_{it} adalah disparitas pendapatan di negara, DEC_{it} adalah desentralisasi fiskal , dan C_{it} adalah variabel kontrol. γ_{it} adalah periode *fixed effects*. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah (1) analisis *cross-*

section menapilkan bahwa Negara dengan meningkatkan proses desentralisasi fiskal menunjukkan penurunan disparitas regional. Kemudian pada analisis *panel data* mengidentifikasi bahwa desentralisasi fiskal membawa menurunkan disparitas dalam jangkauan Negara. (2) pada Negara miskin, desentralisasi fiskal mempunyai dampak negatif dalam retribusi antar wilayah. Dalam beberapa Negara Eropa Barat, desentralisasi fiskal dapat juga menaikkan ketidakmerataan antar wilayah.

Budiantoro Hartono (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan data panel data untuk periode tahun 1981–2005. Model yang digunakan $Vw_t = \alpha_0 + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \beta_3 X3_t + \varepsilon_{it}$ dimana Vw_t adalah disparitas pendapatan regional, X1 adalah investasi, dan X2 adalah angkatan kerja, X3 adalah bantuan dana perkapita. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan, jumlah angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan, Alokasi dana bantuan pembangunan dari pemerintah pusat yang tidak merata dan daerah yang mendapat bantuan terlalu besar dapat meningkatkan tingkat disparitas antar daerah. Hal ini akibat pembangunan yang terkonsentrasi daerah-daerah yang sudah maju dibandingkan daerah yang masih tertinggal, karena daerah yang maju memiliki fasilitas lebih baik dari daerah yang belum maju.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Jaime Bonet(2006) “Fiskal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience”	<p>Data panel</p> $I_{it} = \alpha_{oi} + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 CV_{it} + \varepsilon_{it}$ <p>variabel independent: desentralisasi fiskal dan variabel kontrol (aglomerasi dan perdagangan bebas)</p> <p>variabel dependent: disparitas pendapatan regional</p>	Penelitian ini mengaplikasikan ketidakmerataan distribusi pendapatan teori sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa variabel independent (desentralisasi fiskal dan variabel kontrol) secara simultan berpengaruh pada ketidakmerataan distribusi pendapatan. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif sedangkan variabel kontrol berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan regional.
2	Marie Daumal(2010) ”The Impact Of Trade Openness on Regional Inequality; the cases of India and Brazil”	<p>Data time series (ECM)</p> $\ln Iq_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln openness_t + \alpha_2 \ln fdi_t + \alpha_3 \ln GDPcapita_t + U_t$ <p>variabel independent: perdagangan bebas, FDI(<i>Foreign Direct Investment</i>), GDPcapita India dan Brazil</p> <p>variabel dependent: disparitas</p>	Hasil Penelitian yang di dapat dari bahwa Keterbukaan ekonomi meningkatkan ketidakmerataan pendapatan di India. Sedangkan keterbukaan ekonomi menurunkan ketidakmerataan pendapatan di Brasil. Dan
3	Rui HAO dan Zheng WEI(2007) ”Fundamental Causes Of Inland-Coastal Income Inequality in Post-Reform China”	<p>Data time series</p> $ICGAP_t = \alpha_{oi} + \beta_1 global_{t-1} + \beta_2 decen_{t-1} + \beta_3 market_{t-1} + \varepsilon_{it}$ <p>Data panel</p> $ICGAP_{it} = \alpha_{oi} + \beta_1 global_{it} + \beta_2 decen_{it} + \beta_3 market_{it} + \delta diffusion_{it} + \theta d9100 + \eta_i + \varepsilon_{it}$ <p>variabel independent: liberalisasi perdagangan di</p>	Hasil Penelitian yang di dapat dari bahwa variabel independent (liberalisasi perdagangan di ukur dari rasio perdagangan (ekspor dan impor), desentralisasi, <i>marketization</i> di ukur dari investasi asing) mempunyai hubungan positif terhadap disparitas pendapatan di Cina.

		ukur dari rasio perdagangan (ekspor dan impor), desentralisasi fiskal, <i>marketization</i> diukur dari investasi asing variabel dependent: disparitas antara daerah pinggir dan daerah tengah	
4.	Christian Lessmann(2006) “Fiskal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries”	Data time series $I_i = \alpha + \beta Cntrl_i + \gamma FD_i + \varepsilon_i$ Data panel $I_{it} = \alpha + \beta Cntrl_{it} + \gamma FD_{it} + \varepsilon_{it}$ Variabel independent: Kontrol, desentralisasi fiskal Variabel dependent: disparitas pendapatan	Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif terhadap disparitas pendapatan regional. secara umum desentralisasi di negara miskin kemungkinan berbahaya pada daerah tersebut. Alasannya karena meningkatkan korupsi, dan mengambil resiko mendayagunakan penduduk dan perusahaan setempat. Kemudian di eropa barat desentralisasi berdampak positif disparitas pendapatan antar wilayah, tapi hasil ini ternyata tidak signifikan. Alasan berdampak positif; perbedaan latar belakang yang sulit dengan <i>centralized, communist fiskal organization</i> , dan pertumbuhan sangat cepat pusat aglomerasi.
5.	Christian Lessmann(2006) “Fiskal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Cross-section and Panel Data”	Data Cross Section $RD_i = \alpha + \beta C_i + \gamma DEC_i + \varepsilon_i$ Data Panel $RD_{it} = \alpha_i + \beta C_{it} + \gamma DEC_{it} + \varepsilon_{it}$ Variabel independent: Kontrol Variabel, desentralisasi fiskal Variabel dependent: disparitas pendapatan	(1) analisis <i>cross-section</i> menapilkan bahwa Negara dengan meningkatkan proses desentralisasi fiskal menunjukkan penurunan disparitas regional. Kemudian pada analisis <i>panel data</i> mengidentifikasi bahwa desentralisasi fiskal membawa menurunkan disparitas dalam jangkauan Negara. (2) pada Negara miskin, desentralisasi fiskal mempunyai dampak negatif dalam retribusi antar wilayah. Dalam beberapa Negara Eropa Barat, desentralisasi fiskal dapat juga menaikkan ketidakmerataan anatar wilayah.
6.	Budiantoro Hartono (2008) “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Di	Data Panel $Vw_t = \alpha_o + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \beta_3 X3_t + \varepsilon_{it}$ Variabel independent: Investasi swasta, angkatan	investasi berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan, jumlah angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan, Alokasi dana bantuan pembangunan dari pemerintah pusat yang tidak merata dan daerah yang mendapat

	Provinsi Jawa Tengah”	kerja, alokasi dana bantuan pembangunan Variabel dependen: Disparitas Pembangunan Ekonomi	bantuan terlalu besar dapat meningkatkan tingkat disparitas antar daerah. Hal ini akibat pembangunan yang terkonsentrasi daerah-daerah yang sudah maju dibandingkan daerah yang masih tertinggal, karena daerah yang maju memiliki fasilitas lebih baik dari daerah yang belum maju.
--	-----------------------	---	--

Sumber : Disarikan Dari Beberapa Jurnal international dan Tesis

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 telah membuka akan pentingnya makna ketergantungan antara suatu Negara terhadap Negara lain yang membentuk suatu liberalisasi perdagangan. Hal ini, ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ekonomi negara lain. Sehingga, liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (revisi dari UU no 22/1999 dan UU no 25/1999), yang diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam sistem sentralisasi.

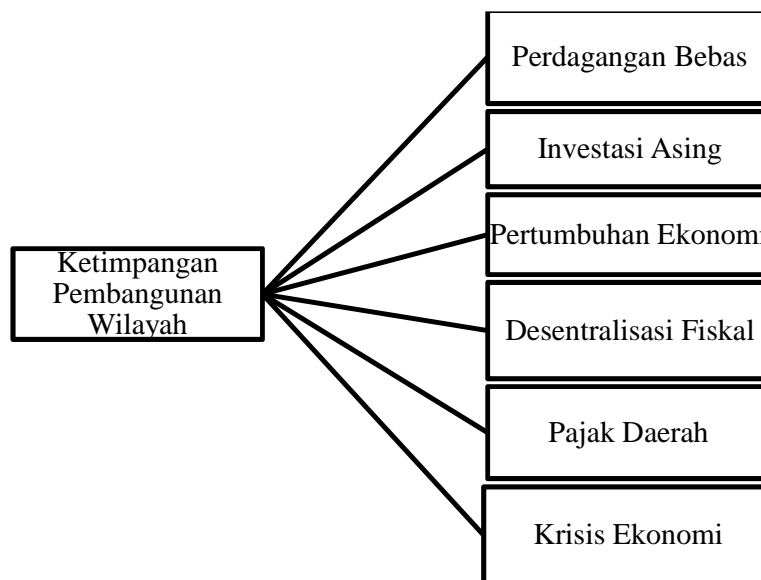
Secara teoritis, desentralisasi mempunyai manfaat, yaitu: *Pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di daerah masing-masing. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produksi melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap (Mardiasmo 2002:6).

Kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup tinggi setelah krisis ekonomi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah.

Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan.

Ketidakmerataan distribusi pemabangunan merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Untuk dapat menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, kita dapat melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya antara lain faktor perdagangan bebas, investasi asing langsung, dan desentralisasi fiskal, pajak daerah, krisis ekonomi. Secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Jaime Bonet (2006), Rui HAO dan Zheng WEI (2007), dan Marie DAUMAL (2010) dengan modifikasi

2.4 Hipotesis

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis adalah pernyataan yang di terima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagai adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dan verifikasi (Nazir, 1999).

Dalam skripsi ini, berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, dirumuskan beberapa kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh positif perdagangan bebas terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga terdapat pengaruh positif investasi asing terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
5. Diduga terdapat pengaruh negatif pajak daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
6. Diduga terdapat perbedaan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain, (Indriantoro dan Supomo, 1999). Variabel–variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah perdagangan bebas, investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak daerah, krisis ekonomi sebagai variabel independen, dan sebagai variabel dependen adalah ketimpangan pembangunan wilayah.

3.1.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmerataan Pembangunan Wilayah

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketidakmerataan pembangunan wilayah. Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan indikator sesuai yang telah digunakan oleh Jaime Bonet (2006).

2. Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas di sini diartikan sebagai kesepakatan/hubungan kerjasama penentuan tarif dan kuota perdagangan yang rendah/nol, sehingga perdagangan internasional akan meningkat melalui kenaikan ekspor maupun impor. Penelitian ini menggunakan indikator sesuai yang telah digunakan oleh Jaime Bonet (2006), Marie Daumal (2010), dan Rui HAO dan Zheng WEI (2007) bahwa “*this variable is the sum exports and imports in percentage of GDP in a given year t*”.

3. Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk investasi langsung. Penelitian ini menggunakan indikator sesuai yang telah digunakan oleh Marie Daumal (2010), dan Rui HAO dan Zheng WEI (2007) bahwa “*the variable foreign direct investment is the net inflows of foreign direct investment in percentage of the GDP*” in a given yaear *t*”.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang penekanannya pada aspek proses, output per kapita, dan jangka waktu. Penelitian ini menggunakan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. PDRB yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam juta

rupiah, yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Simon Kuznets (1995) dan Sutarno dan Mudrajat Kuncoro (2003).

5. Desentralisasi Fiskal

Derajat mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penerimaan yaitu share penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah untuk mengukur derajat desentralisasi daerah yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Suparmoko (1987;320-325) dan Sukanto (2000).

6. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah dengan GDP pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pajak daerah tingkat propinsi pada persentase dari PDRB di Provinsi Jawa Tengah yang diberikan pada tahun t , yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Siti Parhah (2006).

7. Krisis Ekonomi

Dalam penelitian ini variabel krisis ekonomi adalah proksi dengan menggunakan variabel binary dengan kriteria nilai "0" disebut *excluded group* (periode sebelum krisis) yang berarti kondisi ekonomi negara sedang stabil, dan nilai "1" disebut *included group* (periode setelah krisis) yang berarti

kondisi ekonomi negara sedang tidak stabil. Pada penelitian terdahulu variabel ini telah digunakan oleh Tantia (2002).

3.2 Populasi

Dalam penelitian ini penulis mengambil Provinsi Jawa Tengah sebagai obyek penelitian dikarenakan mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ketimpangan pembangunan juga meningkat. Selain itu, juga mempunyai beberapa kesamaan tidak hanya kesamaan geografis, jumlah penduduk, pendidikan dan lain sebagainya. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah berkembang, mempunyai pelabuhan laut yang cukup besar dan potensi dalam perdagangan bebas atau perdagangan internasionalnya. Pantai utara laut jawa khususnya di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan hubungan kerjasama regional pelabuhan laut seperti di kota Tegal, Pekalongan, dan Pemalang, sehingga hal tersebut tidak dipungkiri kenaikan ekspor dan impor di Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data sekunder *time series* yang telah diolah kembali, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Supranto, 2000). Adapun data yang digunakan adalah data tahunan dengan jangka

waktu dari tahun 1996 – 2008 yang dihitung secara triwulan. Data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian meliputi data-data sebagai berikut :

- a. Data Investasi asing langsung di Provinsi Jawa Tengah tahun 1996 – 2008,
- b. Data produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan tahun 1996 – 2008,
- c. Data produk domestik bruto perkapita (PDB perkapita) Indonesia atas dasar harga konstan tahun 1996 – 2008,
- d. Data produk domestik bruto (PDB) Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 1996 – 2008,
- e. Data produk domestik bruto (PDB) Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 1996 – 2008,
- f. Data pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 1981-2006,
- g. Data penerimaan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 1981-2006,
- h. Data ekspor dan impor Provinsi Jawa Tengah tahun 1981-2006,

Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. www.BPS.go.id
2. www.bi.go.id
3. www.bkpm.jawatengah.go.id

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) tahun 1996 – 2008 dalam bentuk kuartalan yang diperoleh dari studi literatur yang telah dipublikasikan oleh instansi yang berwenang meliputi : BPS Provinsi Jawa Tengah dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data kuartalan tahun 1996(1) sampai 2008(4). Bila data kuartal tidak tersedia maka data yang bersangkutan diturunkan dari data tahunan dengan metode interpolasi (Insunkindro, 1984). Rumus interpolasi linear adalah sebagai berikut :

$$Q_{kt} = \frac{1}{4} Y_t \{1 + (k - 2,5) (1 - B) / 4\}$$

Dimana :

k : 1, 2, 3, 4

Q_t : data kwartalan ke k tahun t

Y_t : data tahun t

B : operasi kelambanan (*backward lag operation*)

3.5 Metode Analisis

Dinamika perkembangan variabel-variabel ekonomi juga bisa diamati dari persepektif antar waktu dimana fluktuasi dan dinamika variabel-variabel tersebut naik turun secara siklikal, seasonal, karena pengaruh trend waktu, maupun karena adanya goncangan (*shock*). Model-model struktural yang digunakan untuk menjelaskan dinamika variabel-variabel ekonomi tersebut dalam hubungannya dengan runtun waktu dengan model-model dinamis (*dinamyc model*).

Namun sayangnya, seringkali teori ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan spesifikasi hubungan antar variabel yang dikonstruksikan dalam persamaan simultan dinamis. Terlebih lagi estimasi dan statistik inferensi menjadi sulit untuk dilakukan ketika spesifikasi model ekonometri melibatkan variabel-variabel endogen baik di sisi kiri persamaan maupun sisi kanan persamaan. Kesulitan ini menyebabkan munculnya alternatif untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel di dalam model non struktural.

Adanya masalah tersebut mendorong alternatif lain yang sering disebut model non struktural. Pendekatan ini mencari hubungan antara bermacam-macam variabel yang diinginkan. Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan model *Error Correction Model* (ECM) *Engle-Granger*. Dengan model ini diharapkan dapat menjelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang.

Model dasar dari penelitian ini adalah :

$$Iq = f\{\text{openness, fdi, pe, fd, tax, dt}\} \dots \dots \dots (1.5)$$

Dalam bentuk persamaan menjadi:

$$Iq_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{openness}_t + \alpha_2 \text{fdi}_t + \alpha_3 \text{pe}_t + \alpha_4 \text{fd}_t + \alpha_5 \text{tax}_t + \alpha_6 \text{dt}_t + \mu_i \dots \dots \dots (1.6)$$

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk log linear (*log-linier*). Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghazali, 2005) adalah 1) Menghindari adanya heteroskedastisitas, 2) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas, 3) Mendekatkan skala data. Sehingga persamaan (1.4) akan menjadi persamaan (1.5) sebagai berikut :

$$Liq_t = \alpha_0 + \alpha_1 L\text{openness}_t + \alpha_2 L\text{fdi}_t + \alpha_3 L\text{pe}_t + \alpha_4 L\text{fd}_t + \alpha_5 L\text{tax}_t + \alpha_6 L\text{dt}_t + \mu_i \dots \dots \dots (1.7)$$

Liq	=	Logiq
$L\text{openness}$	=	logopenness
$L\text{fdi}$	=	logfdi
$L\text{pe}$	=	logpe
$L\text{fd}$	=	logfd
$L\text{tax}$	=	logtax

Dimana:

Iq	=	Ketimpangan Pembangunan Wilayah
openness	=	Perdagangan Bebas
fdi	=	Investasi Asing Langsung
fd	=	Desentralisasi Fiskal
tax	=	Pajak Daerah
dt	=	Krisis Ekonomi
α_0	=	Intercept (konstanta)
$\alpha_1 - \alpha_6$	=	Koefisien Regresion

t	= tahun <i>time series</i>
Log	= logaritma
μ	= <i>error term</i>

Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengolah data. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel tak bebas. Terhadap satu atau lebih variabel bebas untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel independen berdasarkan nilai tepat variabel dependen (Gujarati, 1995). Pusat perhatian pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Untuk memperoleh persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini digunakan model dinamis, yaitu dengan menggunakan model koreksi kesalahan (*error correction model*) *Engel Granger*. ECM sebagai analisis pendekatan dinamis mempunyai beberapa kelebihan sehingga model ini dapat diterapkan sebagai alat ekonomi. ketergantungan variabel dependen dengan variabel independennya jarang terjadi seketika. Biasanya variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependennya

tidak dapat terjadi seketika, pengaruhnya dapat dilihat setelah selang waktu tertentu, selang waktu inilah yang disebut dengan *lag* (kelambanan). Alasan keberadaan kelambanan ini (Gujarati,2003) adalah:

1. Alasan Psikologis

Adanya kebiasaan (inersia) dari masyarakat yang tidak biasa mengikuti perubahan yang terjadi pada harga ataupun peningkatan pendapatan. proses perubahan tersebut melibatkan disutilitas segera (*immediate disutilities*). Disamping itu, masyarakat juga tidak mengetahui apakah perubahan tersebut bersifat sementara atau tetap. Reaksi terhadap peningkatan pendapatan tergantung apakah peningkatan tersebut sementara.

2. Alasan Teknologi

Perubahan tidak akan terburu-buru untuk mensubstitusikan modalnya antara tenaga kerja dengan kapital jika terjadi penurunan harga relatif pada tenaga kerja, terutama bila perusahaan mengharapkan bahwa setelah terjadi penurunan sementara tersebut, harga modal akan naik lebih tinggi dari pada semula. Pengetahuan yang tidak sempurna juga mengetahui terjadinya kelambanan.

3. Alasan Kelembagaan

Kewajiban kontraktual juga dapat mencegah perusahaan untuk melakukan perubahan (*switching*) dari satu sumber tenaga kerja atau bahkan bahan mentah ke sumber lainnya. Contoh lain misalnya, seseorang memilih asuransi kesehatan dalam jangka waktu satu tahun, dan sekali pilihan dijatuhkan maka orang tersebut tidak

dapat beralih keasuransi yang lain selama paling tidak satu tahun. Kondisi seperti ini disebut kondisi *locked in* (terperangkap).

Alasan digunakan ECM (*error correction model*) dalam penelitian ini (Insukindro,1992) adalah:

1. ECM adalah salah satu model *autoregresif*, mengikutsertakan pengaruh pertimbangan lag dalam analisisnya sehingga model ini sesuai diterapkan dalam penelitian menggunakan data yang berbentuk *time series*.
2. Kemampuan ECM dalam meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.
3. Pendekatan ini telah ada di Indonesia dan mampu menjelaskan pengalaman-pengalaman ekonomi Indonesia.

3.5.1 Stasioneritas Data

Menurut Insukindro (1992), pembahasan mengenai uji stasioner dan uji kointegrasi berkaitan dengan nilai R^2 sebagai salah satu kriteria dalam memilih model yang baik. Adanya kemungkinan dalam regresi linier dihasilkan R^2 yang tinggi, tetapi setelah dilihat lebih jauh ternyata hasil regresi tersebut tidak konsisten dengan teori yang dipilih atau tidak lulus uji asumsi klasik serta memiliki Durbin-Watson (DW) yang rendah. Hal ini mengindikasikan terjadinya regresi lancung. Regresi yang estimasi menderita regresi lancung adalah dengan membandingkan nilai R^2 dengan nilai DW-nya. Bila nilai model tersebut lebih rendah dari nilai DW-nya, maka model tersebut dicurigai sebagai regresi lancung. Menyebutkan bahwa autokorelasi

merupakan gejala terjadinya lancung pada suatu model. Oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh regresi lancung tersebut maka diperlukan cara untuk menghindarinya dalam model analisis. Cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

3.5.2 Uji Akar-Akar Unit

Teori ekonometri berlandaskan asumsi stasioneritas data yang ditunjukkan dengan nilai mean, varian dan kovarian yang konstan untuk semua nilai t . Bila regresi dilakukan pada data runtun waktu yang tidak stasioner maka dikhawatirkan akan menghasilkan regresi linier lancung (*spurious regression*). Regresi linier lancung ditandai dengan nilai R^2 yang tinggi dan nilai *Durbin Watson* yang rendah (Insukindro, 1992). Akibat yang ditimbulkan oleh regresi linier lancung adalah koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan meleset dan uji baku yang umum untuk koefisien terkait menjadi tidak sah.

Menurut Gujarati (2003) pengujian stasioneritas data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Melakukan plotting terhadap data
2. Melihat *correlogram autocorrelation function*
3. Uji akar-akar unit

Penelitian ini akan menggunakan uji akar-akar unit untuk melihat stasioneritas data. Uji derajat integrasinya akan dilakukan jika data belum stasioner pada derajat nol.

Uji stasioneritas ini dilakukan untuk melihat apakah data time series mengandung akar unit (*unit root*). Untuk itu, metode yang biasa digunakan adalah uji *Dickey-Fuller* (DF) dan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF).

Uji DF (Thomas, 1997) diformulasikan sebagai berikut:

$$X_t = \alpha + \phi X_{t-1} + \mu_t \dots \dots \dots (1.8)$$

Dengan memasukkan X_{t-1} , persamaan (1.7) kemudian bisa ditulis kembali:

$$\Delta X_t = \alpha + \phi^* X_{t-1} + \mu_t \dots \dots \dots (1.9)$$

Di mana :

$$\phi^* = \phi - 1$$

X = Variabel yang diamati

Hipotesis yang digunakan adalah $H_0 : \phi^* = 0$ (data tidak stasioner) dan $H_a : \phi^* < 0$ (data stasioner). Jika probabilitas t statistik lebih kecil dari tingkat kepercayaan (1 persen, 5 persen, atau 10 persen) atau nilai DF hitung lebih negatif dari *critical value* nya maka hipotesis nol ditolak yang berarti data yang diuji stasioner.

Uji ADF dalam (Thomas, 1997) diformulasikan sebagai berikut:

$$X_t = \alpha + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_r X_{t-r} + \mu_t \dots \dots \dots (1.10)$$

Persamaan (1.9) bisa dituliskan kembali:

$$\Delta X_t = \alpha + \phi^* \Delta X_{t-1} + \phi^* \Delta X_{t-2} + \dots + \phi^*_{t-r+t} + \mu_t \dots \dots \dots (1.11)$$

Hipotesis yang digunakan adalah $H_0 : \phi^* = 0$ (data tidak stasioner) dan $H_a : \phi^* < 0$ (data stasioner). Jika probabilitas t statistik lebih kecil dari tingkat kepercayaan (1

persen, 5 persen, atau 10 persen) atau nilai ADF hitung lebih negatif dari nilai *critical value*-nya maka hipotesis nol ditolak (data stasioner).

3.5.3 Uji Derajat Integrasi

Uji ini merupakan kelanjutan dari uji akar unit. Uji ini hanya diperlukan jika data belum stasioner pada derajat nol. Uji derajat integrasi ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat berapa data yang diamati akan stasioner. Jika setelah dilakukan pengujian akar unit ternyata data tersebut belum stasioner, maka dilakukan pengujian ulang dengan menggunakan data nilai perbedaan pertamanya (*first difference*). Apabila dengan data dari *first difference* belum juga stasioner, maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan data dari nilai perbedaan kedua (*second difference*) dan seterusnya hingga diperoleh data yang stasioner. Definisi secara formal mengenai integrasi suatu data adalah data runtun waktu X dikatakan berintegrasi pada derajat i atau ditulis $I(i)$, jika data tersebut perlu didefinisikan sebanyak i kali untuk mencapai data yang stasioner.

3.5.4 Uji Kointegrasi

Kointegrasi dapat diartikan sebagai suatu hubungan jangka panjang (*long term relations/ equilibrium*) antara variabel-variabel yang tidak stasioner. Keberadaan hubungan kointegrasi memberikan peluang bagi data- data yang secara individual tidak stasioner untuk menghasilkan sebuah kombinasi linier diantara data tersebut

sehingga tercipta kondisi yang stasioner. Kointegrasi regresi bermaksud membuktikan bahwa terjadi kesesuaian dengan teori pada jangka panjang.

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar unit dan uji derajat integrasi. Tujuan dilakukannya uji kointegrasi adalah untuk mengkaji stasioneritas residual regresi kointegrasi. Stasioneritas residual sangat penting jika ingin mengembangkan suatu model dinamis, terutama ECM yang mencakup variabel-variabel kunci pada regresi kointegrasi terkait. Pada prinsipnya dalam model koreksi kesalahan (ECM) terdapat keseimbangan jangka panjang yang tetap diantara variabel-variabel ekonomi. Jika dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode, maka model koreksi kesalahan akan mengoreksinya pada periode berikutnya. Mekanisme koreksi kesalahan ini dapat diartikan sebagai penyelarasan perilaku jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian model koreksi kesalahan konsisten dengan konsep kointegrasi atau dikenal dengan *Granger Representation Theorem*.

Thomas (1997) menyatakan bahwa hubungan jangka panjang yang unik antara dua variabel runtun waktu dapat terjadi jika :

1. Kedua variable runtun waktu tersebut stasioner setelah dideferensiasi satu kali I(1).
2. Terdapat kombinasi linear antara kedua variabel stasioner tersebut. Jika hal ini terjadi, maka korelasi antara kedua variabel tersebut tidak *spurious*.

Engle dan Granger (1987) menyetujui uji statistik untuk menguji hipotesis nol tidak adanya kointegrasi. Namun mereka berpendapat bahwa dalam sebagian kasus yang diamati ternyata bahwa uji CRDW (*Cointegrating Regression*

Durbin Watson), DF (*Dickey-Fuller*), dan ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) merupakan uji statistik yang paling disukai dan sering digunakan dalam pendekatan ini (Gujarati,2003). Untuk menghitung statistik ADF dan CRDW ditaksir dengan regresi kointegrasi berikut dengan metode OLS sebagai berikut :

Augmented Dickey-Fuller Test

Mengestimasi nilai residu dari hasil regresi untuk mendapatkan nilai ADF uji kointegrasi, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung koefisien u_{t-1} pada persamaan (1.10)

$$\Delta u_t = \alpha_1 u_{t-1} + \sum_{i=1}^n \alpha_{i+1} \Delta u_{t-1} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(1.12)$$

Cointegrating Regression Durbin Watson (CRDW) Test

Mengestimasi model berikut :

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \dots + \alpha_n X_{nt} + U_t \dots\dots\dots (1.13)$$

Dimana,

Y_t = variabel dependen observasi t

X_n = variabel independen observasi t ke-n

Dari langkah ini, akan diperoleh besarnya nilai CRDW yaitu berdasarkan nilai DW (*Durbin Watson*) statistik/hitung.

Dari hasil estimasi nilai CRDW dan ADF statistik diatas, kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya untuk kedua; uji tersebut dalam tabel nilai CRDW dan ADF untuk uji kointegrasi dan harus stasioner pada tingkat level. Dimana jika CRDW dan ADF statistik/hitung pada derajat kepercayaan tertentu lebih besar dari nilai kritisnya berarti H_0 yang menyatakan tidak ada kointegrasi antara variabel

dapat ditolak. Atau dengan kata lain variabel-variabel yang ada dalam persamaan tersebut saling berkointegrasi.

3.5.5 Penentuan Panjang Lag

Untuk melakukan uji kointegrasi terlebih dahulu dilakukan uji panjang lag. Penentuan panjang lag atau lag yang optimum dalam studi ini mengikuti konsep yang dilakukan oleh Schwarz, yaitu dengan memperhatikan besaran *Schwarz Criterion* yang dihasilkan. Adapun besaran *Schwarz Criterion* (SC) dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

$$SC = e^{2k/n} \frac{\sum U_i^2}{n} = e^{2k/n} \frac{RSS}{n} \dots\dots\dots (1.14)$$

Di mana:

RSS = Residual Sum Square

K = Jumlah regressor termasuk intersep

N = Jumlah observasi

Untuk kemudahan perhitungan, persamaan (1.15) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln SC = (2k/n) + \ln (RSS/n) \dots\dots\dots (1.15)$$

Di mana :

$\ln SC$ = Logaritma natural dari SC

$2k/n$ = *penalty factor*

Dalam program Eviews dapat menampilkan SC secara otomatis. Adapun prosedur yang perlu dilakukan adalah menentukan lag optimal untuk X dengan melakukan autoregresi berturut-turut pada lag 1,2,3,... n sehingga kita harus menentukan misal lag maksimal (n) adalah 8. Dari hasil-hasil regresi tersebut kita perhatikan SC yang dihasilkan kita pilih SC yang terkecil sebagai panjang lag yang optimal setelah diperoleh lag optimal, kita memasukkan variabel Y untuk mengetahui apakah Y berpengaruh terhadap X berturut-turut mulai lag 1,2, ... n. Dari hasil regresi-regresi tersebut kita pilih model dengan besaran *Schwarz* paling kecil.

3.5.6 Model Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model*) Engle-Granger

The error correction model (ECM) pertama kali digunakan oleh Sargan dikembangkan oleh Engel dan Granger untuk mengoreksi *disequilibrium*. Pada prinsipnya jika dua variable Y dan X berkointegrasi, maka hubungan keduanya bisa disebut dengan ECM. Hal ini disebut the *Granger representation theorem*. Selanjutnya model ECM yang dikembangkan Engel-Granger disebut ECM Engle-Granger (Gujarati,2003).

Jika suatu persamaan telah terkointegrasi, maka persamaan tersebut telah mengalami equilibrium dalam jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek belum tentu mengalami equilibrium. Sehingga, *error term* dalam uji kointegrasi dapat digunakan sebagai "*equilibrium error*" untuk menentukan perilaku variabel dependen dalam jangka pendek (Gujarati, 2003). Perhatikan persamaan berikut ini:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t \dots\dots\dots (1.16)$$

Dan *disequilibrium error* persamaan (1.17) dapat ditulis dengan:

$$\mu_t = Y_t - \beta_1 - \beta_2 X_t \dots\dots\dots (1.17)$$

jika dua variable Y dan X dalam persamaan (1.17) diatas berkointegrasi, maka dalam jangka panjang telah mengalami equilibrium. Dalam jangka pendek, equilibrium dapat diperoleh dari residual yang diperoleh dari persamaan diatas (μ_t) jika stasioner, yang bisa dilihat dari DF dan ADF *test*. Residual yang stasioner yang mempunyai implikasi bahwa variable Y dan X berkointegrasi (Thomas,1997).

The Granger-Representation ada, jika X_t dan Y_t berkointegrasi, jika *disequilibrium error* (μ_t) (1.18), adalah stasioner dan (μ_t) memiliki derajat integrasi nol/ I (0). Hal ini tepat apa yang diimplikasikan oleh *error correction model* (R.L Thomas,1997).

Dalam *Engel-Granger* ada dua prosedur dalam ECM. Pertama (*first stage*), estimasi parameter jangka panjang dengan mengestimasi *cointegrating regression* persamaan (3.10). Kedua (*second stage*), estimasi *cointegrating regression* dari residual/estimasi *disequilibrium error*, μ_t dalam persamaan (1.15) (R.L Thomas,1997).

Maka dalam penelitian ini akan digunakan prosedur menurut *Engel-Granger* atau disebut ECM *Engel-Granger* seperti diatas.

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 DX_1 + \alpha_2 DX_2 + \alpha_3 DX_3 + \alpha_4 DX_4 + \alpha_5 DX_5 + \alpha_6 DX_6 + \epsilon_t \dots\dots\dots (1.18)$$

Model (1.18) diatas akan digunakan untuk mengestimasi koefisien variabel dalam jangka panjang ECM *Engel-Granger*.

ECM *Engel-Granger* dalam jangka pendek dari persamaan (1.19) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D_Y = \alpha_0 + \alpha_1 \beta D X_1 + \alpha_2 \beta D X_2 + \alpha_3 \beta D X_3 + \alpha_4 \beta D X_4 + \alpha_5 \beta D X_5 + \alpha_6 \beta D X_6 + \alpha e_{t-1} \dots \dots \dots (1.19)$$

Dimana :

β adalah *first different operator*

$e_{t-1} = (Y - \alpha_0 - \alpha_1 X_{1,t-1} - \alpha_2 X_{2,t-1} - \alpha_3 X_{3,t-1} - \alpha_4 X_{4,t-1} - \alpha_5 X_{5,t-1} - \alpha_6 X_{6,t-1})$ adalah nilai lag satu periode dari *error* pada regresi kointegrasi persamaan (1.20)

Jika variabel dependen dan variabel independen berkointegrasi maka terdapat hubungan keseimbangan panjang antar variabel tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menjamin adanya keseimbangan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, *error correction term* (ECT) dalam uji kointegrasi bisa digunakan sebagai *equilibrium error* untuk menentukan perilaku variabel dependen dalam jangka pendek (Gujarati, 2003).

Suatu metode yang pertama kali digunakan oleh Sargan yang dikenal dengan ECM (*Error Correction Model*) menawarkan suatu cara untuk mengoreksi *disequilibrium* dalam jangka pendek tersebut. *Representation theorem. Granger Representation Theorem* menyatakan jika variabel dependen dan independen berkointegrasi maka dua variabel tersebut dapat dinotasikan dalam bentuk ECM. Alasan digunakan ECM (*Error Correction Model*) dalam penelitian ini (Insukindro, 1993) :

1. ECM yang merupakan suatu autoregresif, mengikutsertakan pertimbangan pengaruh *lag* dalam analisisnya sehingga model ini sesuai diterapkan dalam penelitian yang menggunakan data yang berbentuk *time series*
2. Kemampuan ECM dalam meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang
3. Pendekatan ini telah diterapkan di Indonesia dan mampu menjelaskan pengalaman - pengalaman ekonomi di Indonesia

Sebagaimana halnya model PAM, ECM juga diturunkan dari fungsi biaya kuadrat tunggal (Insukindro, 1990:95-96 dan Insukindro, 1993:125).

Berkaitan dengan itu, Domowitz dan Elbadawi (1987) menawarkan fungsi kuadrat tunggal yang cocok untuk menurunkan ECM yaitu dengan memasukkan vector yang mempengaruhi variable tak bebas dengan bobot tertentu dan diasumsikan secara linier tergantung kepada variable bebas pada komponen biaya penyesuaian.

Dengan demikian fungsi biaya kuadrat tunggal untuk menurunkan ECM adalah sebagai berikut (Insukindro, 1990:95-99, Insukindro, 1993:125-126. Dan Insukindro, 1999:4-6) :

$$C_t^e = e_1 (UKR_t - UKR_t^*)^2 + e_2 ((1-B) UKR_t - f_t (1-B)Z_t)^2 \dots\dots\dots(1.21)$$

- Dimana
- UKR_t : Variabel aktual
 - UKR_t^* : Variabel yang diinginkan
 - B : Operasi kelembaman waktu
 - Z_t : Vektor variabel yang mempengaruhi

f_t : Vektor deret yang merupakan bobot pada komponen biaya penyesuaian untuk persamaan terkait

E_1 dan E_1 : Bobot yang diberikan pelaku ekonomi atas kedua fungsi biaya tersebut

Minimisasi fungsi biaya persamaan (1.21) terhadap UKR_t ($\partial C_t^e / \partial UKR_t = 0$) maka akan diperoleh persamaan berikut :

$$UKR_t = e UKR_t^* + (1-e) B UKR_t - (1-e) f_t (1-B) Z_t \dots \dots \dots (1.22)$$

Dimana : $e = \frac{e1}{e1 + e2}$ dan $\frac{e2}{e1 + e2}$

Dengan mensubstitusikan persamaan model penyesuaian parsial dalam persamaan (1.22), maka akan diperoleh :

$$UKR_t = a_0e + a_1eLopenness_t + a_2eLfdi_t + a_3eLpe_t + a_4eLfd_t + a_5eLtax_t + a_6edt_t + (1-e)UKR_{t-1} + (1-e)f_1(1-B)Lopenness_t + (1-e)f_2(1-B)Lfdi_t + (1-e)f_3(1-B)Lpe_t + (1-e)f_4(1-B)Lfd_t + (1-e)f_5(1-B)Ltax_t + (1-e)f_6(1-B) dt_t \dots \dots \dots (1.23)$$

Persamaan (1.23) dapat ditulis sebagai berikut :

$$UKR_t = g_0 + g_1Lopenness_t + g_2Lfdi_t + g_3Lpe_t + g_4Lfd_t + g_5Ltax_t + g_6dt_t + g_7Lopenness_t + g_8Lfdi_t + g_9Lpe_t + g_{10}Lfd_t + g_{11}Ltax_t + g_{12}dt_t + g_{13} UKR_{t-1} + U_t \dots \dots \dots (1.24)$$

dimana

$g_0 = a_0e$	$g_7 = - (1-e)f_1$
$g_1 = a_1e + (1-e)f_1$	$g_8 = a_1e + (1-e)f_2$
$g_2 = a_2e + (1-e)f_2$	$g_9 = a_1e + (1-e)f_3$
$g_3 = a_3e + (1-e)f_3$	$g_{10} = a_1e + (1-e)f_4$

$$\begin{aligned}
 g_4 &= a_4e + (1-e)f_4 & g_{11} &= a_{11}e + (1-e)f_5 \\
 g_5 &= a_5e + (1-e)f_5 & g_{12} &= a_{12}e + (1-e)f_6 \\
 g_6 &= a_6e + (1-e)f_6 & g_{13} &= (1-e)
 \end{aligned}$$

Persamaan (1.24) mencerminkan hubungna jangka pendek atau keidakseimbangan yang meliputi nilai level (aras) dan kelembaman variable. Permasalahan utama dalam mengestimasi persamaan (1.24) adalah berkaitan dengan level variable (level of variable) yang mungkin tidak stasioner, maka estimasi persamaan (1.24) dengan menggunakan metode OLS dapat menyebabkan munculnya regresi lancung (Insukindro, 1999:5). Untuk mengatasi masalah tersebut, persamaan (1.24) diparameterisasi ulang menjadi :

$$\begin{aligned}
 \text{DUKR}_t &= \alpha_0 + \alpha_1 \text{DLopenness}_t + \alpha_2 \text{DLfdi}_t + \alpha_3 \text{DLpe}_t + \alpha_4 \text{DLfd}_t + \alpha_5 \text{DLtax}_t + \alpha_6 \text{Ddt}_t + \alpha_7 (\text{UKR}_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 \text{Lopenness}_t - \beta_2 \text{Lfdi}_t - \beta_3 \text{Lpe}_t - \beta_4 \text{Lfd}_t - \beta_5 \text{Ltax}_t - \beta_6 \text{Ldt}_t - 1) \dots \dots \dots (1.25)
 \end{aligned}$$

dimana

$$\begin{aligned}
 \text{DX}_t &= \text{X}_t - \text{X}_{t-1} \\
 \alpha_1 &= g_1 & \beta_0 &= g_0 / (1-g_{13}) \\
 \alpha_2 &= g_2 & \beta_1 &= (g_1 + g_7) / (1-g_{13}) \\
 \alpha_3 &= g_3 & \beta_2 &= (g_1 + g_8) / (1-g_{13}) \\
 \alpha_4 &= g_4 & \beta_3 &= (g_1 + g_9) / (1-g_{13}) \\
 \alpha_5 &= g_5 & \beta_4 &= (g_1 + g_{10}) / (1-g_{13}) \\
 \alpha_6 &= g_6 & \beta_5 &= (g_1 + g_{11}) / (1-g_{13}) \\
 \alpha_7 &= g_7 & \beta_6 &= (g_1 + g_7) / (1-g_{13})
 \end{aligned}$$

Persamaan (1.25) hanya meliputi kelembaman satu periode sehingga dikenal sebagai first order ECM. Dimungkinkan merumuskan ECM dengan derajat kelembaman lebih

besar dari satu sehingga diperoleh second order atau third order ECM (Insukindro, 1999:5-6).

Persamaan (1.25) dapat ditulis menjadi :

$$DUKR_t = \gamma_0 + \gamma_1 DLopenness_t + \gamma_2 DLfdi_t + \gamma_3 DLpe_t + \gamma_4 DLfd_t + \gamma_5 DLtax_t + \gamma_6 Ddt_t + \gamma_7 ECT \dots \dots \dots (1.26)$$

dimana

$\gamma_0 = \alpha_1$	$\gamma_4 = \alpha_4$
$\gamma_1 = \alpha_2$	$\gamma_5 = \alpha_5$
$\gamma_2 = \alpha_3$	$\gamma_6 = \alpha_6$
$\gamma_3 = \alpha_3$	

Berdasarkan persamaan (1.26) dapat ditemukan ciri khas dari model ECM. Koefisien error correction term (ECT) = γ_{15} harus signifikan secara statistic dan positif. Hasil estimasi ECM akan berarti apabila $\gamma_{15} \neq 0$ dan signifikan. Jika γ_{15} tidak berbeda dengan nol ($\gamma_{15} = 0$), maka persamaan (1.26) akan berubah menjadi :

$$UKR_t = \gamma_0 + (\gamma_1 - \gamma_7) Lopenness_t + (\gamma_2 - \gamma_8) Lfdi_t + (\gamma_3 - \gamma_9) Lpe_t + (\gamma_4 - \gamma_{10}) Lfd_t + (\gamma_5 - \gamma_{11}) Ltax_t + (\gamma_6 - \gamma_{12}) dt_t + \gamma_{13} UKR_{t-1} \dots \dots \dots (1.27)$$

$$UKR_t = \delta_0 + \delta_1 Lopenness_t + \delta_2 Lfdi_t + \delta_3 Lpe_t + \delta_4 Lfd_t + \delta_5 Ltax_t + \delta_6 dt_t + \delta_{13} UKR_{t-1} \dots \dots \dots (1.28)$$

Hasil regresi dari persamaan ini untuk persamaan jangka panjangnya (*disequilibrium long run relationship*), yaitu:

$$LIQ_t = \alpha_0 + \alpha_1 Lopenness_t + \alpha_2 Lfdi_t + \alpha_3 Lpe_t + \alpha_4 Lfd_t + \alpha_5 Ltax_t + \alpha_6 dt_t + u_t \dots \dots \dots (1.29)$$

Sedangkan untuk hubungan jangka pendek (*disequilibrium short run relationship*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$DLIQ_t = \beta_0 + \psi U_{t-1} + \beta_1 DLOpenness_t + \beta_2 DLfdi_t + \beta_3 DLpe_t + \beta_4 DLfd_t + DLtax_t + V_t \dots\dots(1.30)$$

3.6 Pengujian Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Heterokedastisitas

Salah satu penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama atau varian setiap gangguan yang dibatasi untuk nilai tertentu mengenai pada variabel-variabel independen berbentuk nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Dan jika suatu populasi yang dianalisis memiliki gangguan yang variansnya tidak sama maka mengindikasikan terjadinya kasus heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat (U_t^2) dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung X^2 , dimana $X^2 = n * R^2$ (Gujarati, 1995 :379). Dimana pengujiannya adalah jika X^2 -hitung < X^2 -tabel, atau bisa dilihat dari nilai probability *Obs*R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 1 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3.6.2 Uji Autokorelasi

Menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada *time-series*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Imam Ghozali, 2005). Akibatnya adanya autokorelasi parameter yang diamati menjadi bias dan variannya tidak minus sehingga sehingga tidak efisien, hal ini biasa terjadi karena (Gujarati, 1995) :

1. Adanya pengaruh akumulasi spasial data *error-section* gejala yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di daerah lain karena eratnya hubungan ekonomi diantara dua daerah ini.
2. Pengaruh *shock* yang berkelanjutan dalam data *time-series* gangguan memiliki efek yang seringkali
3. Inersia, akibatnya adanya media atau kondisi psikologis dan aksi masa lampau, yang sering memiliki efek yang kuat pada aksi saat ini, sehingga gangguan positif pada satu periode waktu mungkin mempengaruhi aktifitas periode yang akan datang.
4. Manipulasi data-data yang dipublikasikan yang seringkali di hasilkan dari interpolasi atau smooting yang mengakibatkan gangguan yang besar sepanjang periode waktu menjadi rata-rata

5. Kesalahan spesifikasi, penghilangan variabel penjelas yang relevan akan menyebabkan gangguan yang disebabkan oleh spesifikasi model yang keliru terautokorelasi. Demikian juga halnya dengan bentuk fungsional yang keliru.

Dimana konsekuensi dari adanya autokorelasi ini adalah (Gujarati, 1995) :

1. Penaksiran tidak efisien, selang keyakinan menjadi lebar secara tidak perlu dan pengujian signifikasinya kurang akurat.
2. Varian residual menaksir terlalu rendah.
3. Pengujian t dan f tidak sah sehingga memberi kesimpulan yang menyesatkan mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch – Godfrey (BG Test) (Gujarati, 1995): Pengujian dengan BG Test dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu U_i dengan model *autoregressive* dengan orde ρ sebagai berikut :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_\rho U_{t-\rho} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (1.31)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 \dots \rho_\rho = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila X^2 tabel, atau bisa dilihat dari nilai probability *Obs*R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 1 persen. Maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model dapat ditolak.

3.6.3 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu kuadran dimana satu atau lebih variabel dependennya dapat menyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Dan bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel *Ortoground* adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Multikol dapat dilihat juga dari *tolerance* and *variance inflation factor* (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolinieritas dalam suatu model empiris. Misalkan nilai R^2 dari hasil estimasi regresi secara parsial mendekati 1, maka nilai VIF akan mempunyai nilai tak terhingga. Dengan demikian, bila kolineritas meningkat, maka varian dari penaksir akan meningkat dalam limit yang tak terhingga. VIF dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1-r_{x_1x_2}^2)} \dots\dots\dots (1.32)$$

Sebagaimana *rule of thumb* dari VIF, jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0.09, maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi. (gujarati, 2003).

Dan nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya *multikolonieritas* adalah nilai *tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai VIF >10 dan

hasil perhitungan VIF tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF >10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. (Ghozali, 2005).

3.6.4 Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam penerapan OLS (*Ordinary Least Square*) dalam regresi linier klasik adalah distribusi probabilitas dari gangguan U_t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan memiliki varian yang konstan. Untuk menguji apakah distribusi data normal dilakukan dengan uji *Jarque Bera* atau *J-B test*.

$$J - B \text{ hitung} = \left[S^2/6 + \left(\frac{k-3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots (1.33)$$

Dimana :

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai $J - B \text{ hitung} > J-B \text{ tabel}$, atau bisa dilihat dari nilai probability *Obs*R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 1 persen. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual U_t terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

3.7 Pengujian Kriteria Statistik Analisis Regresi

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 1995).

Uji statistik terdiri dari uji *goodness of fit* (uji R^2), uji signifikansi parameter secara bersamaan (uji F), dan uji signifikansi parameter secara individu (uji t).

3.7.1 Pengujian Koefisien determinasi uji *goodness of fit*

Nilai R^2 disebut juga koefisien determinasi. Nilai R^2 menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (*Goodness of fit test*). Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula:

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2} \dots\dots\dots (1.34)$$

Di mana:

y^* = Nilai y estimasi

y = Nilai y aktual

Nilai R^2 berkisar antar 0 dan 1. Semakin besar nilai R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.

Sebaliknya semakin kecil nilai R^2 berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Kelemahan mendasar penggunaan uji determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model, karena setiap tambahan satu variabel independen berpengaruh terhadap hasil penelitian, maka banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik.

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$ semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama
2. $H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$ semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(N-1)} \dots\dots\dots (1.35)$$

Dimana :

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi menggunakan *two test regression* pada $\alpha = 1$ persen dan $\alpha = 5$ persen, dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a) H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila F hitung $< F$ tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- b) H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila F hitung $> F$ tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.7.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dilakukan menggunakan *two test regression* pada $\alpha = 1$ persen dan $\alpha = 5$ persen, untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada hubungan antara variabel perdagangan bebas dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
2. $H_1 : b_2 < 0$ ada pengaruh positif antara variabel perdagangan bebas dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
3. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada hubungan antara variabel investasi asing langsung dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.

4. $H_1 : b_2 < 0$ ada pengaruh positif antara variabel investasi asing langsung dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
5. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
6. $H_1 : b_2 < 0$ ada pengaruh positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
7. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada hubungan antara variabel desentralisasi fiskal dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
8. $H_1 : b_2 < 0$ ada pengaruh positif antara variabel desentralisasi fiskal dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
9. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada hubungan antara variabel pajak daerah dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
10. $H_1 : b_2 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel pajak daerah dengan ketidakmerataan pembangunan wilayah.
11. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada perbedaan tingkat ketidakmerataan pembangunan wilayah sebelum dan sesudah krisis ekonomi.
12. $H_1 : b_2 < 0$ ada perbedaan tingkat ketidakmerataan pembangunan wilayah sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus :

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)} \dots\dots\dots (1.36)$$

Dimana :

β_i = parameter yang diestimasi

β_i^* = nilai hipotesis dari β_i ($H_0 : \beta_i = \beta_i^*$)

$SE(\beta_i)$ = simpangan baku β_i

Pada tingkat signifikansi *two test regression* pada $\alpha = 1$ persen dan $\alpha = 5$ persen, dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika t-hitung >t-tabel maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika t-hitung <t-tabel maka H_0 diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.